



**DPUPKP  
Bantul**

**2022**

# LAPORAN KINERJA

*#sigapmembangunnegeri*

-  dpupkp\_bantul
-  dpupkp\_bantul
-  dpupkp\_bantul
-  dpupkp\_bantul
-  dpupkp.bantulkab.go.id

## **ALAMAT :**

Jalan Panembahan Senopati, Dagaran, Palbapang,  
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY  
Kode Pos 55713



# **LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2022**

**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan**

**Kawasan Permukiman**

**Kabupaten Bantul**



# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 31 Januari 2023

Kepala



Aris Suharyanta, S.Sos., MM.

NIP. 19640617 1987 03 1 009

# Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam IKU, disimpulkan bahwa keenam indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 208,01%. Kelima indikator tersebut adalah :

1. Tingkat Kemantapan Jalan
2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi



3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
4. Penduduk berakses air minum layak
5. Penduduk berakses sanitasi layak
6. Penanganan kawasan kumuh

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Bab I    Pendahuluan .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Pembentukan OPD.....	2
C.    Susunan Organisasi .....	3
D.    Keragaman SDM .....	6
E.    Isu Strategis.....	8
F. <i>Cascading</i> Kinerja.....	9
G.    Peta Proses Bisnis.....	10
H.    Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	12
Bab II   Perencanaan Kinerja .....	14
A.    Rencana Strategis.....	14
B.    Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	22
C.    Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	27
Bab III  Akuntabilitas Kinerja.....	29
A.    Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	30
B.    Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	32
C.    Akuntabilitas Anggaran.....	131
D.    Efisiensi Sumber Daya.....	135
Bab IV  Penutup .....	138

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2022.....	7
Tabel 2.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022.....	7
Tabel 3.	Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP .....	8
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja.....	17
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Akhir Renstra .....	18
Tabel 6.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	19
Tabel 7.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	24
Tabel 9.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	27
Tabel 10.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	31
Tabel 12.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik.....	33
Tabel 13.	Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2018 - 2022.....	35
Tabel 14.	Data Pembebasan Tanah Bagi Pelebaran Jalan Cinomati Tahun 2021 - 2022.....	37
Tabel 15.	Pendataan Leger Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	38
Tabel 16.	Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	39
Tabel 17.	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	40
Tabel 18.	Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	43
Tabel 19.	Data Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	45
Tabel 20.	Data Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Tahun 2022 .....	47
Tabel 21.	Data penerbitan IMB/PBG dan SLF Tahun 2021-2022 .....	54
Tabel 22.	Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .....	55
Tabel 23.	Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2022 .....	57

Tabel 24.	Bimbingan Teknis Tahun 2022 .....	59
Tabel 25.	Sosialisasi Bina Konstruksi Tahun 2022 .....	60
Tabel 26.	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi .....	63
Tabel 27.	Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016- .....	64
Tabel 28	Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022 .....	65
Tabel 29	Data Perencanaan Teknis untuk Konstruksi Bangunan Air .....	66
Tabel 30	Data Bangunan Penampung Air (Embung) Tahun 2022 .....	68
Tabel 31	Data Peningkatan Afvour Tahun 2022.....	69
Tabel 32	Data Rehabilitasi Bangunan Tebing Tahun 2022 .....	70
Tabel 33	Data Perencanaan Teknis Konstruksi Irigasi.....	73
Tabel 34	Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan .....	75
Tabel 35	Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022.....	75
Tabel 36	Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.....	78
Tabel 37	Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2021 .....	78
Tabel 38.	Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2022.....	81
Tabel 39	Data Keluaran Dokumen Rencana Teknis dan Kebijakan SPAM .....	83
Tabel 40	Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2022.....	84
Tabel 41	Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2022.....	85
Tabel 42	Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2022.....	87
Tabel 43.	Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2022 .....	88
Tabel 44	Data Keluaran Penyusunan Rencana Teknis dan Kebijakan SPALD .....	90
Tabel 45	Data Perluasan SR SPALD Terpusat Sewon .....	91
Tabel 46	Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2022 .....	92
Tabel 47	Data pelaksanaan sosialisasi Pengelolaan Air Limbah.....	94
Tabel 48	Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2022 .....	96
Tabel 49	Pemeliharaan Drainase Tahun 2022.....	100
Tabel 50	Data pembangunan sistem drainase lingkungan Tahun 2022 .....	103
Tabel 51	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik.....	106

Tabel 52	Hasil Identifikasi Rumah Rawan Longsor di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	109
Tabel 53	Hasil Identifikasi Rumah Rawan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	109
Tabel 54	Pendapatan Asli Daerah dari Rusunawa dan Pengolahan Limbah Cair Tahun 2017-2022.....	112
Tabel 55	Penerbitan Izin Site Plan di Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	113
Tabel 56	Peserta Sosialisasi Rumah Tidak layak Huni di Kabupaten BantulTahun 2022.....	117
Tabel 57	Data Perbaikan RTLH Tahun 2022.....	119
Tabel 58	Data Pembangunan Baru RTLH Tahun 2022.....	123
Tabel 59	Data Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022.....	126
Tabel 60	Data Penyerahan PSU Perumahan.....	128
Tabel 61.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022.....	133
Tabel 62	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	135
Tabel 63.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	137

# Daftar Gambar

---

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul .....	5
Gambar 2. Proses pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran Jalan Cinomati yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Yogyakarta.....	37
Gambar 3. Peningkatan Jalan Dlingo - Pokoh di Kapanewon Dlingo .....	43
Gambar 4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Dodogan - Pokoh.....	44
Gambar 5. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Belik (Jejeran - Sudimoro).....	45
Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa .....	50
Gambar 7. Pembangunan Gedung Pelayanan DPMPT di Komplek 2 Perkantoran Pemkab Bantul.....	55
Gambar 8. Pelatihan tenaga terampil konstruksi Tahun 2022 .....	57
Gambar 9. Bimbingan Teknis Tahun 2022 .....	60
Gambar 10. Sosialisasi Bina Konstruksi Tahun 2022 .....	61
Gambar 11. Proses Pelaksanaan Pembangunan Embung.....	68
Gambar 12. Proses Pelaksanaan Pembangunan Afvour .....	70
Gambar 13. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai.....	71
Gambar 14. Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022 .....	76
Gambar 15. Peta jaringan irigasi di Kabupaten Bantul .....	77
Gambar 16. Angkat sedimen dan pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi .....	80
Gambar 17. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Sriharjo.....	85
Gambar 18. Perluasan SPAM di Kalurahan Wirokerten.....	87
Gambar 19. SPALD-T Panggunharjo.....	91
Gambar 20. Pembangunan Tangki Septik Individu di Jatimulyo, Dlingo .....	93
Gambar 21. Kunjungan Bupati dalam Rangka Peresmian SPALD-T Permukiman Seloharjo.....	97
Gambar 22. Rumah Pilah Sampah Tipe A di Banguntapan .....	99
Gambar 23. Pemeliharaan Drainase Sempu di Kapanewon Kasihan.....	101

Gambar 24. Pembangunan Drainase Lingkungan di Ngaglik Pendowoharjo Sewon..	104
Gambar 25. Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan di Kabupaten Bantul.....	115
Gambar 26. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Di Kapanewon Imogiri Bantul .....	118
Gambar 27. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kalurahan Argodadi .....	120
Gambar 28. Penataan Kawasan Kumuh di Dusun Kweden Kalurahan Trirenggo.....	122
Gambar 29. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kalurahan Srimulyo .....	124
Gambar 30. Survey ketersediaan PSU di Lokasi Perumahan.....	129

# Bab I Pendahuluan

---

## ***Bab I Pendahuluan***

### ***berisi :***

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*

### A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. DPUPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.



## B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. Susunan Organisasi

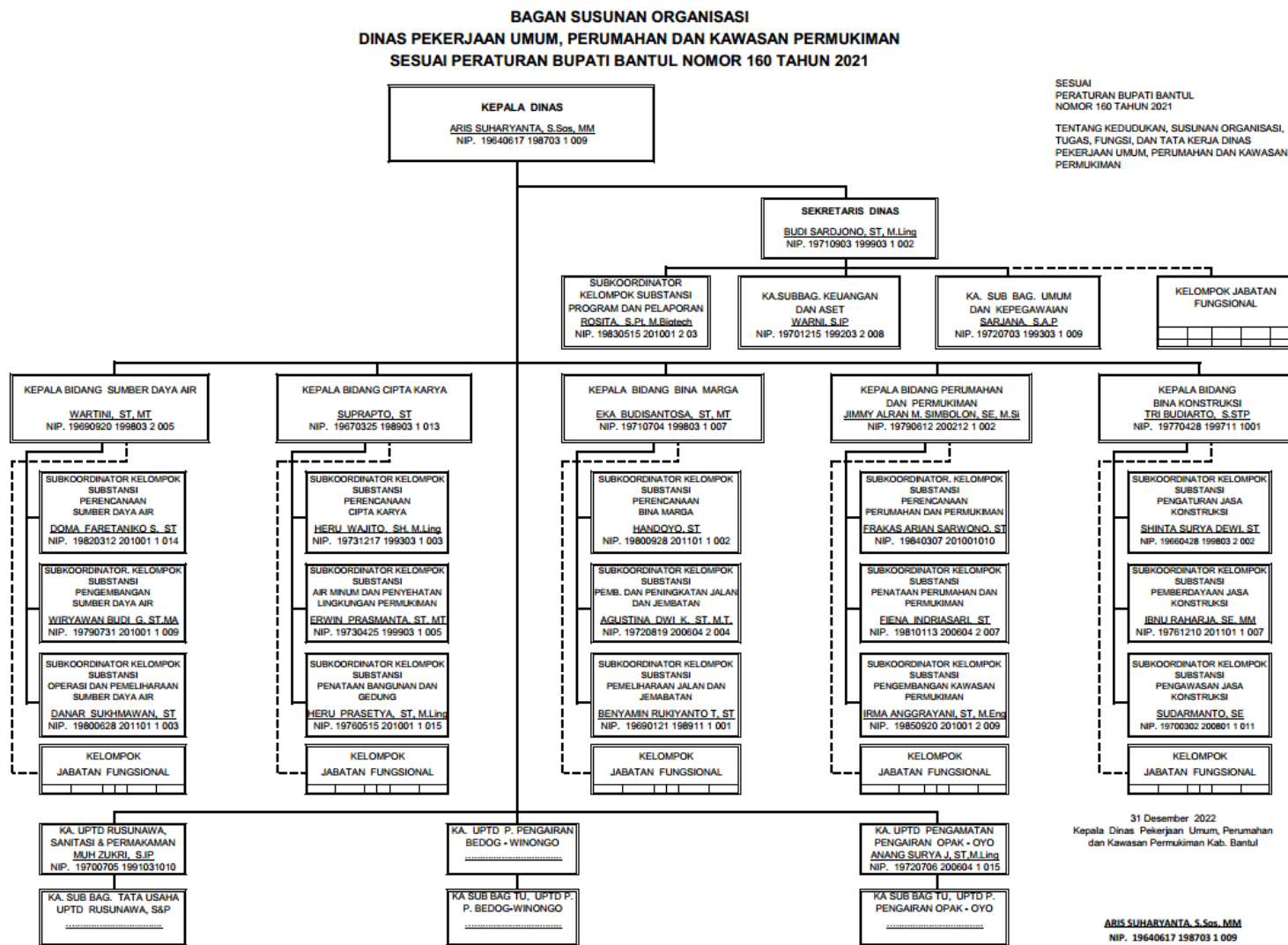
Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul, struktur organisasi DPUPKP terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Bina Marga;
6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Bidang Bina Konstruksi;
8. UPT; dan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Gambar 1.** Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul



#### D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 ada 94 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2022

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
94	82	12	5	34	45	10

Sumber: DPUPKP, 2022

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan					
	SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2
94	5	5	55	2	22	16

Sumber: DPUPKP, 2022

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	24	3	13	7	1
Bidang Sumber Daya Air	10	-	3	6	1
Bidang Cipta Karya	10	-	-	8	2
Bidang Bina Marga	14	1	4	7	2
Bidang Perumahan dan Permukiman	7	-	2	4	1
Bidang Bina Konstruksi	12	-	3	8	1
UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	6	1	2	3	-
UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	-	5	-	1
UPTD Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman	3	-	1	2	-
JFT	2	-	1	-	-
Total	94	5	34	45	10

Sumber: DPUPKP, 2022

#### E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

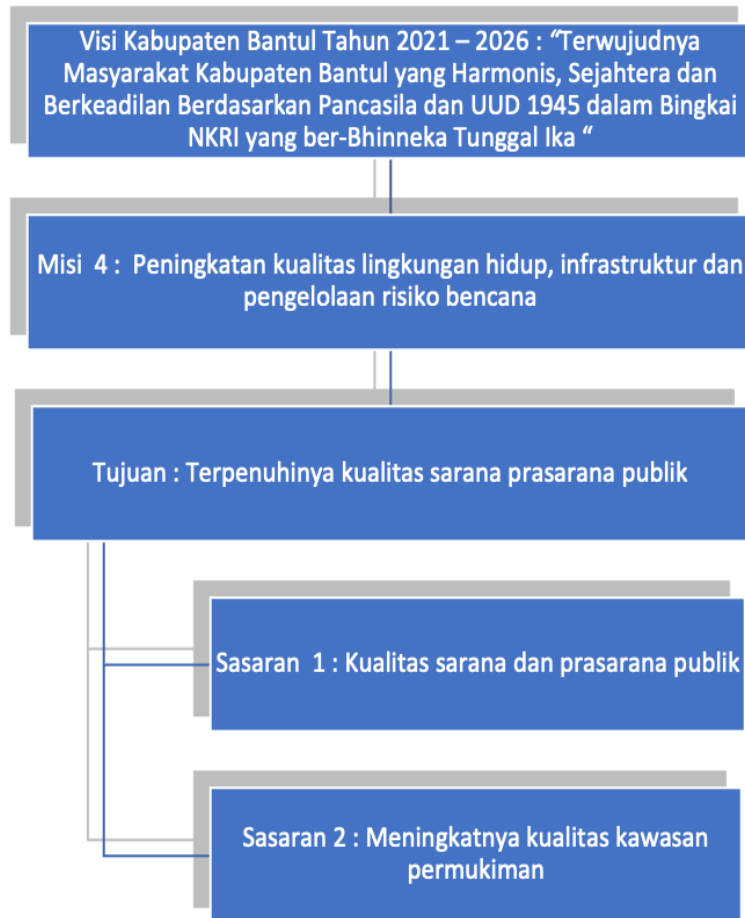
1. Peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum, sanitasi dan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian utama dalam rangka pemenuhan SPM dan optimalisasi kualitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jalan dan fasilitas umum untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman/perumahan melalui penyediaan infrastruktur pendukung pertanian serta penyediaan/penyusunan regulasi di bidang pengembangan Kawasan permukiman/ perumahan
4. Peningkatan kualitas usaha jasa konstruksi melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan tertib usaha dalam rangka peningkatan kualitas prasarana dan sarana public.

#### F. *Cascading* Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan



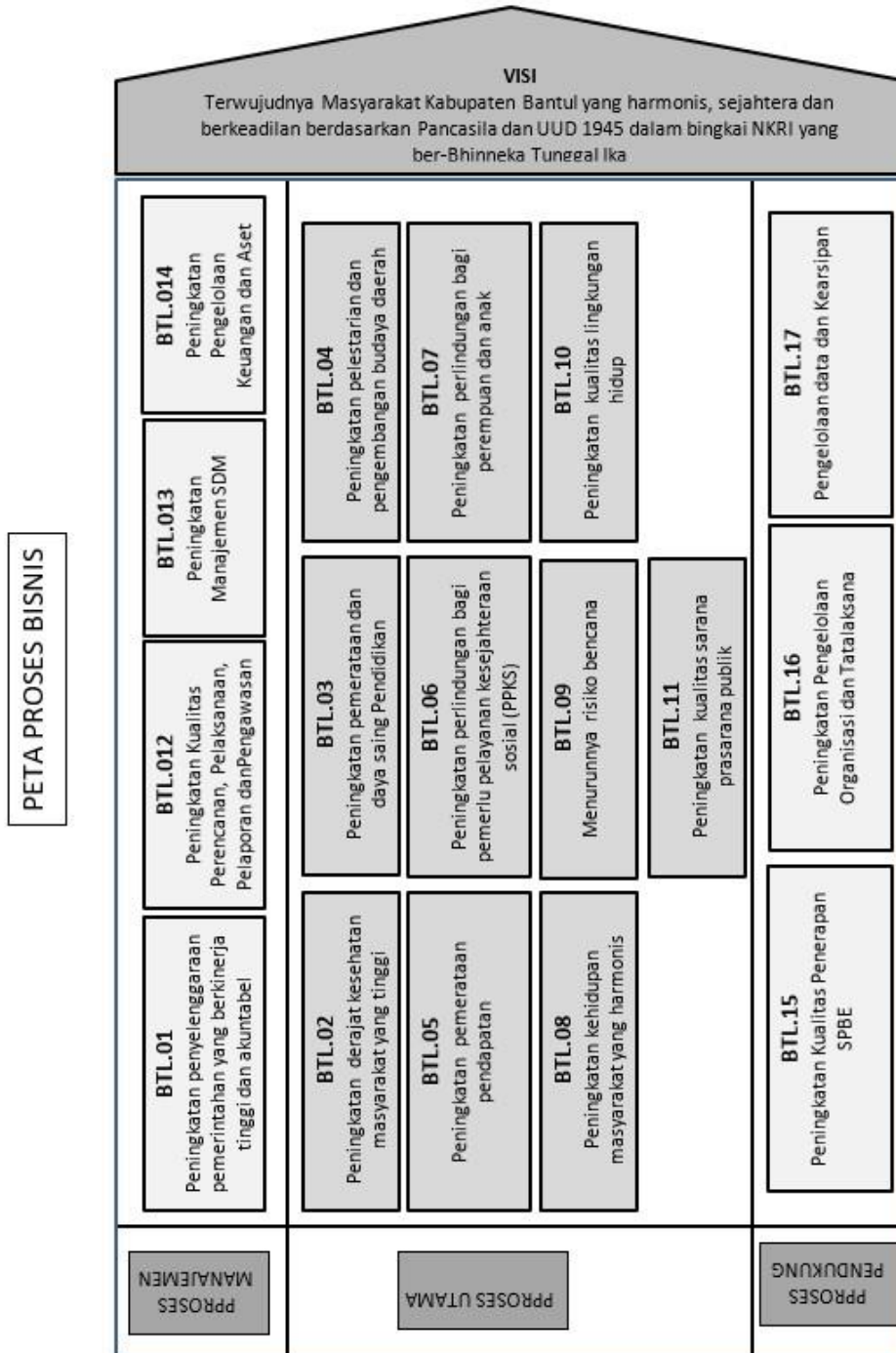
sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



#### G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku

kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul :



#### H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/069.A/Ev.SAKIP/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	Pada Bab III dalam Laporan Kinerja seharusnya menyajikan analisis yang memadai, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya namun menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	Telah dilakukan perbaikan
2.	Pemantauan rencana aksi agar dilaksanakan sepenuhnya supaya dapat memberikan alternatif perbaikan	Selalu dilakukan review terhadap rencana aksi pada tiap triwulan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan.
3.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Telah dilakukan perbaikan

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
4.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam rangka perencanaan pembangunan dan terintegrasi dengan aplikasi Esakip ROPK untuk melakukan pengukuran pemantauan dan evaluasi kinerja.

# Bab II Perencanaan Kinerja

## A. Rencana Strategis

### 1. Visi dan Misi

***Bab II Perencanaan Kinerja berisi :***  
*a. Rencana Strategis*  
*b. Perjanjian Kinerja*  
*c. Program Untuk Pencapaian Sasaran*

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun

waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan

dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.*

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi

Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Misi ke-4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Penduduk berakses air minum layak
		Penduduk berakses sanitasi layak	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh



Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2022 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Target Akhir 2026
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	%	78,43	80,07
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	%	0,40	0,6
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	80,37	81,81
		Penduduk berakses air minum layak	%	83,56	86,76
		Penduduk berakses sanitasi layak	%	87,86	100
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	%	10,59	52,95

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi</li> <li>Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll)</li> <li>Proaktif melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata</li> <li>Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan</li> <li>Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan</li> <li>Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan</p>	<p>pemerintah</p> <p>6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)</p>
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis masyarakat (partisipatif)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Pengembangan Permukiman
- h. Program Penataan Bangunan Gedung
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Pengembangan Perumahan
- l. Program Kawasan Permukiman
- m. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Penduduk berakses air minum layak
		Penduduk berakses sanitasi layak
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh

Sumber: DPUPKP, 2022

#### B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.  
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

*Wibawa Bantul dan Amanah Bantul*

Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul Di Yogyakarta Kode Pos 55713  
Telp / Fax : (0274) 367310  
Website: dpupkp.bantulkab.go.id | Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2022



PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.  
NIP. 19690619 199603 1 003

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	78,43	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	78,43*)
		Rasio bangunan	Persen	0,40	Triwulan I	-
				Triwulan II	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penduduk berakses sanitasi layak	Persen	87,86	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	87,86*)
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	Persen	10,59	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	10,59*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.375.395.741
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 17.741.460.613
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 9.613.738.032
4.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 781.899.850
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.010.524.644



No	Nama Program	Anggaran
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 61.453.243.868
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 763.744.164
11.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 3.872.070.374
12.	Program Kawasan Permukiman	Rp 8.799.525.458
13.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 420.000.000
14.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 100.000.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 174.973.780.613</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI



DR. H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.  
NIP. 19690619 199603 1 003

### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 9. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 11.

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan Perumahan</li><li>2. Program Kawasan Permukiman</li><li>3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</li><li>4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li></ol>

Sumber: DPUPKP, 2022

# Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

## *Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :*

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama*
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- c. Akuntabilitas Anggaran*
- d. Efisiensi Sumberdaya*

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2017

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022				Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
		2021	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02	78,43	78,93	100,64	80,07	98,58
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	n/a	0,40	1,7	425,00	0,6	283,33
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01	80,37	80,46	100,11	81,81	98,35
4	Penduduk berakses air minum layak	n/a	83,56	83,56	100	86,76	96,32
5	Penduduk berakses sanitasi layak	n/a	87,86	87,86	100	100	87,86
6	Penanganan kawasan kumuh	92,49	10,59	44,72	422,29	52,95	84,46

Sumber : DPUPKP, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 208,01%.

#### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

### 1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat lima indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini. Indikator seperti pada tabel di bawah.

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	78,02	78,43	78,93	100,64	80,07	98,58
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	n/a	0,40	1,7	425,00	0,6	283,33
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,01	80,37	80,46	100,11	81,81	98,35
4	Penduduk berakses air minum layak	n/a	83,56	83,56	100	86,76	96,32
5	Penduduk berakses sanitasi layak	n/a	87,86	87,86	100	100	87,86

Sumber : DPUPKP, 2022



### Tingkat Kemantapan Jalan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 78,43%, realisasi sebesar 78,93%, tercapai 100,64% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,67% maka capaian tahun 2022 naik sebesar 0,97%. Target capaian tahun 2022 (akhir Renstra) sebesar 80,07%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 98,58% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Kondisi ini masih jauh di bawah capaian kondisi jalan mantap pada jalan nasional di DI Yogyakarta sebesar 98,42% dan di atas kondisi mantap jalan propinsi di Kabupaten Bantul sebesar 70,18%. Diperlukan strategi dan percepatan untuk mengejar ketertinggalan penanganan jalan di Kabupaten Bantul.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2022 sepanjang 473,567km atau 75,835% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 150,903km atau 24,165% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Selengkapnya, data kondisi jalan kabupaten dan jalan desa seperti pada Tabel berikut :

Tabel 13. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
			Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
1	2018	624,47	465,73	74,58	158,74	25,42
2	2019	624,47	468,97	75,10	156,64	25,08
3	2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
4	2021	624,47	473,51	75,66	151,59	24,27
5	2022	624,47	473,567	75,835	150,903	24,165

Sumber : DPUPKP, 2022

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1). Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten dan meningkatkan kualitasnya. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp61.989.618.993,- dengan realisasi Rp49.466.257.456,- atau 79,80%. Target dan realisasi keluaran kegiatan ini adalah 100% Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten atau tercapai 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jalan kabupaten dan meningkatkan kualitasnya. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp61.989.618.993,- dengan realisasi Rp49.466.257.456,- atau 79,80%. Target dan realisasi

keluaran kegiatan ini adalah 100% Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten atau tercapai 85,7%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah agar penanganan jalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu jalan yang dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan memenuhi syarat baik dari segi teknis, keamanan, kenyamanan dan sebagainya, maupun dari segi biaya fisik konstruksi jalan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu perencanaan penanganan jalan yang komprehensif diantaranya dengan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

- Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Cinomati. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah bidang tanah yang dibebaskan sejumlah 7 bidang dan terealisasi 1 bidang tanah yang dibebaskan. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp7.937.634.040,- terealisasi sebanyak Rp172.988.540,- atau terealisasi 2,18%.

Pembebasan tanah bagi pelebaran jalan Cinomati ini dilaksanakan melalui pentahapan, tahun 2021 - 2022 adalah tahap pelaksanaan

yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Yogyakarta. Data pembebasan lahan tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 14 Data Pembebasan Tanah Bagi Pelebaran Jalan Cinomati Tahun 2021 - 2022

No	Kalurahan	Jenis Lahan	Pembayaran Tahun 2021			Pembayaran Tahun 2022		
			Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)	Jumlah Bidang	Luas	Nilai (Rp)
1	Terong	Tanah Warga	28	6.020	3.931.096.100			
		Tanah Kehutanan						
		Tanah Enklave						
2	Wonolelo	Tanah Warga	57	14.060	7.686.200.400	1	391	172.149.900
		Tanah Oo						
Jumlah			85	20.080	11.617.296.500	1	391	172.149.900



**Gambar 2.** Proses pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran Jalan Cinomati yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Yogyakarta.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk mengelola leger jalan. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp454.470.000,- terealisasi sebesar Rp407.597.200,- atau tercapai sebesar 89,69%.

Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah laporan hasil penyusunan data leger jalan sebanyak 3 dokumen, atau tercapai 100%. Pendataan leger jalan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 15 Pendataan Leger Jalan Kabupaten Tahun 2022

PAKET I					
NO	NO RUAS	RUAS	PANJANG	JUMLAH BIDANG	LUASAN (M <sup>2</sup> )
1	K.175	Klodran - Bejen	1.44	10	10,079
2	K.185	Nyangkringan - Gedrian	0.29	2	2,889
3	K.188	Gedrian - Simpang Bejen	0.53	2	5,259
4	K.176	Klodran - Simpang Bejen	1.55	6	17,722
5	K.187	Simpang Paseban - Simpang Badegan	0.36	3	2,632
6	K.189	Simpang Badegan - Bogoran	0.14	1	1,048
Total			4.31	24	39,629

PAKET II					
NO	NO RUAS	RUAS	PANJANG	JUMLAH BIDANG	LUASAN (M <sup>2</sup> )
1	K.173	Gose - Lapangan Paseban	0.21	1	2,294
2	K.161	Simpang Paseban - Ringin Harjo	1.15	11	6,988
3	K.170	Lapangan Paseban - Taman Paseban	0.26	1	4,486
4	K.159	Kuwiran - Melikan Kidul	1.44	7	8,196
5	K.162	Mandingan - Babadan	0.79	4	6,311
6	K.207	Nogosari - Srenen	0.48	3	1,963
Total			4.33	27	30,238

PAKET III					
NO	NO RUAS	RUAS	PANJANG	JUMLAH BIDANG	LUASAN (M <sup>2</sup> )
1	K.291	Simpang Manding - Jetis	2.25	21	19,549
2	K.204	Perumahan - Tajeman	1.21	4	6,304
3	K.168	Kabupaten - Kabupaten	0.23	1	1,226
4	K.165	Masjid Agung - Pasar Bantul	0.6	2	5,320
Total			4.29	28	32,399

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp3.792.980.594,- terealisasi sebesar Rp3.568.278.800,- atau terealisasi sebesar 94,08%. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan jalan kabupaten sebanyak 24 dan tercapai sebanyak 23 ruas. Data ruas

jalan kabupaten yang dipelihara pada Tahun 2022 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 16 Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Uraian
1	K.150 Dadapan-Ngrendeng
2	K.374 Dodogan-Pokoh
3	K.135 Druwo-Ngoto
4	K.201 Gerdu-Jebugan
5	K.281 Jejeran-Pleret
6	K.97 Jombok-Triharjo
7	K.241 Kanoman-Jurugendong
8	K.289 Kertan-Trimulyo
9	K.228 Kretek-Depok
10	K.63 Niten-Bangunjiwo
11	K.329 Piyungan-Wanujoyo
12	K.14 Plembutan-Bandut Lor
13	K.30 Rejodadi-Nitipratan
14	K.356 Siluk-Srunggo
15	K.7 Simpang Sedayu-Batas Kab. Sleman
16	K.72 Sindon-Bibis
17	K.105 Srandakan-Talkondo
18	K.115 Srigading-Sanden
19	K.309 Srihardono-Jonggrangan
20	Strategis Wilayah Barat
21	Strategis Wilayah Tengah
22	Strategis Wilayah Timur
23	K.284 Bawuran-Wonolelo

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas jalan melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp39.074.178.816,- terealisasi Rp35.058.222.916,- atau terealisasi sebesar 89,72%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten sebanyak 66

ruas. Data ruas jalan kabupaten yang mengalami peningkatan/rehabilitasi pada Tahun 2022 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 17 Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Ruas	Kapanewon	Panjang Tertangani (m)
1	Jalan Simpang paseban - Ringinharjo	Bantul	354
2	Jalan Kalirandu-Beji	Pajangan	310
3	Jalan Pedes – Metes	Sedayu	865
4	Jalan Kaliputih - Miri K.141	Sewon	463
5	Jl. Kajor - Kedungjati	Imogiri	1.667
6	Jl. Mangunan - Terong	Dlingo	2.145
7	Jl. Mojohuro - Kedungmiri	Imogiri	2.355
8	Jl. Sindet - Segoroyoso	Jetis	4.592
9	Jalan Lo Putih - Maladan	Dlingo	603
10	Jalan Sambeng - Gading Sari	Srandakan	268
11	Jalan Kweni - Glugo	Sewon	353
12	Jalan Miri - Gaten	Sewon	500
13	Jalan Kasihan - Batas Kab. Sleman	Kasihan	265
14	Jalan Sindet - Plencing	Jetis	440
15	Talud Jalan Piyungan - Wonolelo	Pleret	32
16	Drainase Jalan Ganjuran - Patalan	Bambanglipuro	200
17	Gorong-gorong Jl. Jetis - Karangsemut	Jetis	24
18	Talud Jalan Banjarharjo-Pucung	Dlingo	211
19	Drainase Jalan Muntuk - Terong	Dlingo	72
20	Jalan Dlingo - Kebosungu	Dlingo	340
21	Jalan Miri - Ngimbang	Sewon	206
22	Jalan Sendangwesi - Maladan	Dlingo	368
23	Jalan Srandakan - Mangiran	Srandakan	429
24	Jalan Wirokerten - Tobratan	Banguntapan	450
25	Jalan Dlingo - Pokoh	Dlingo	642
26	Jalan ISI - Sawit K.137	Sewon	196

No	Ruas	Kapanewon	Panjang Tertangani (m)
27	Jalan Jogoragan - Pleret	Banguntapan	448
28	Jalan Jetis/Kasihani - Karangjati	Kasihani	244
29	Jalan Manding - Simpang Manding	Bantul	280
30	Jalan Petir - Umbulsari/Ngoro - oro K.331	Piyungan	388
31	Jalan Pijenan - Guwosari	Pajangan	187
32	Jalan Kasongan - Kembaran	Kasihani	237
33	Jalan Manukan/Gandek - Mangir	Pajangan	788
34	Jalan Kebonagung - Kruduk	Imogiri	383
35	Jalan Girirejo - Payaman Girirejo	Imogiri	325
36	Jalan Tarudan - Timbulharjo	Sewon	239
37	Jalan Gejlik Pitu - Talkondo	Srandakan	169
38	Jalan Suren Wetan - Pulokadang	Jetis	791
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 1			
39	Gorong-Gorong Jalan Sanden - Celep	Sanden	26
40	Gorong-Gorong Sindon - Bibis	Pajangan	13
41	Jalan Pasar Turi - Bambon	Bambanglipuro	442
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 2			
42	Jalan Kalangan - Tegaldowo	Bantul	141
43	Jalan Ngentak - Diro	Sewon	246
44	Jalan Perumahan - Tajeman	Bantul	383
45	Drainase Jalan Gose - Jetak	Bantul	126
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 3			
46	Jalan Kembaran - Sembungan	Kasihani	200
47	Talud Jalan Bangunjiwo - Metes	Kasihani	371
48	Drainase Jalan Gangin - Tlogo	Kasihani	226
49	Drainase Jalan Niten - Bangunjiwo	Kasihani	204
50	Drainase Jalan Padokan -	Kasihani	228



No	Ruas	Kapanewon	Panjang Tertangani (m)
Nitiprayan			
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 4			
51	Gorong-Gorong Jalan Cangkring - Karangnongko	Jetis	105
52	Jalan Gelangan - Bakulan	Jetis	185
53	Jalan Turi - Kepek	Jetis	250
54	Talud Jalan Balakan - Sumberagung	Jetis	102
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 5			
55	Gorong-Gorong Jetis - Jurug	Sedayu	5
56	Jalan Sungapan - Sungapan Dukuh	Sedayu	106
57	Talud Jalan Sambikerep - Batas Sleman	Sedayu	204
58	Drainase PLN Pedes - Metes	Sedayu	74
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 6			
59	Talud Jalan Gunungpuyuh - Belan	Pundong	85
60	Talud Jalan Ngasinan - Girirejo	Imogiri	58
61	Talud Jalan Piring Lor - Piring Kidul	Pundong	68
62	Talud Jalan Srunggo - Kalidadap	Imogiri	20
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten Paket 7			
63	Gorong - Gorong Jalan Munggur - Petir	Piyungan	36
64	Jalan Ngangkruk - Pelemwulung	Banguntapan	168
65	Talud Jalan Pandeyan - Nglebeng	Banguntapan	117
66	Drainase Gedongkuning - Batas Kodya	Banguntapan	78



Gambar 3. Peningkatan Jalan Dlingo - Pokoh di Kapanewon Dlingo

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp3.792.980.594,- terealisasi sebesar Rp3.568.278.800,- atau terealisasi sebesar 94,08%. Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan jalan kabupaten sebanyak 23 ruas. Data ruas jalan kabupaten yang dipelihara pada Tahun 2022 tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 18 Data Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Uraian
1	K.150 Dadapan-Ngrendeng
2	K.374 Dodogan-Pokoh
3	K.135 Druwo-Ngoto
4	K.201 Gerdu-Jebugan
5	K.281 Jejeran-Pleret
6	K.97 Jombok-Triharjo
7	K.241 Kanoman-Jurugendong
8	K.289 Kertan-Trimulyo
9	K.228 Kretek-Depok
10	K.63 Niten-Bangunjiwo

No	Uraian
11	K.329 Piyungan-Wanujoyo
12	K.14 Plembutan-Bandut Lor
13	K.30 Rejodadi-Nitipratan
14	K.356 Siluk-Srunggo
15	K.7 Simpang Sedayu-Batas Kab. Sleman
16	K.72 Sindon-Bibis
17	K.105 Srandakan-Talkondo
18	K.115 Srigading-Sanden
19	K.309 Srihardono-Jonggrangan
20	Strategis Wilayah Barat
21	Strategis Wilayah Tengah
22	Strategis Wilayah Timur
23	K.284 Bawuran-Wonolelo



Gambar 4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Dodogan - Pokoh

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan  
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jembatan pada jalan kabupaten melalui rehabilitasi dan

pemeliharaan jembatan pada jalan kabupaten. Pagu anggaran sebesar Rp7.967.382.027,- terealisasi Rp7,694.312.500,- atau sebesar 96,57%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah rehabilitasi jembatan pada 6 lokasi. Data jembatan yang dipelihara pada Tahun 2022 tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 19 Data Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon
1	Jembatan Belik (Jejeran - Sudimoro)	Pleret
2	Jembatan Glagahan	Pandak
3	Jembatan Bulusari	Piyungan
4	Jembatan Klagaran	Sanden
5	Jembatan Gupakwarak	Pajangan
6	Jembatan Triwidadi - Sudimoro/Butuh	Pajangan



Gambar 5. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Belik (Jejeran - Sudimoro)

- Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan system manajemen mutu pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik merupakan satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan Bidang Jalan dan Jembatan dengan tepat biaya, mutu dan waktu. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan sehingga jalan dan jembatan yang dibangun baik rehabilitasi, pemeliharaan atau pembangunan dapat menghasilkan konstruksi yang layak, baik dan efisien sesuai dengan harapan.

Pagu anggaran sebesar Rp1.007.000.000,- terealisasi Rp871.298.000,- atau sebesar 86,52%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 10 dokumen laporan hasil pengawasan teknis peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan.

## 2) Program Pengembangan Permukiman

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam pengembangan permukiman. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas prasarana lingkungan permukiman berupa jalan desa. Anggaran program Pengembangan Permukiman adalah sebesar Rp.25.291.559.229,-.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman berupa jalan desa. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.291.559.229,-.

Target dan keluaran berupa capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur perdesaan sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk membangun infrastruktur jalan desa pada permukiman dalam rangka mendukung akses masyarakat ke pusat perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Pagu anggaran sebesar Rp.25.291.559.229,-. Target dan keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 44 ruas jalan desa ditingkatkan/direhabilitasi atau tercapai 100%. Data peningkatan/rehabilitasi jalan desa tersaji pada table berikut :

Tabel 20 Data Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Tahun 2022

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PANJANG PENANGANAN (METER)
1	Jl. Panjangjiwo-Sulang Lor	359,067,000	69.00
2	Jl. Mojosari – Umbulsari	419,519,000	413.00
3	Jl. Madugondo – Gampingan	395,000,000	340.00
4	Jl. Kagungan – Kabregan	371,775,000	360.00
5	Jl. Tangkilan – Bebekan	355,855,000	491.00
6	Jl. Gunturgeni – Puron	441,193,000	441.00
7	Jl. Baros- Wuluhadeg	349,184,000	420.00
8	Jl. Kowang - Denokan	368,683,000	400.00
9	Jl. Mangunan- Kaebun Buah	507,552,000	280.00
10	Jembatan Guyangan	982,819,000	141.00
11	Jembatan Pacar Trimulyo	2,703,748,000	396.80
12	Jalan Wonodoro-Warungpring	308,413,000	347.00
13	Jalan Tegalsari - Karanggayam	357,295,000	166.00
14	Jalan Ngingas - Panggang	290,583,000	277.50
15	Jalan Ngentak-Sumberan	337,707,000	380.00
16	Jalan Ngentak-Kalipakem	340,756,000	363.00
17	Jalan Mangunan - Bengkung	276,039,000	278.00
18	Jalan Karanganom - Pacar	299,598,000	354.00

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PANJANG PENANGANAN (METER)
19	Jalan Cabean - Geneng	322,181,000	317.00
20	Jalan Banjarharjo - Sanggrahan (Talud)	457,901,000	89
21	Talud Jalan Keputren-Pungkuran (Talud)	220,947,000	310,5
22	Jalan Somenggalan - Demangan	298,591,000	275.00
23	Jalan Nglembu-Jetis	355,620,000	122.00
24	Jalan Kurahan - Gejlik pitu	323,818,000	405.00
25	Jalan Koripan 2 - Pokoh 1	267,064,000	307.00
26	Jalan Bawuran - Bojong	300,143,000	398.00
27	Jalan Jolosutro - Kaligatuk	759,481,000	626.00
28	Jalan Pringgading - Dadabong	311,725,000	105.00
29	Jalan Desa Jolosutro -Pandeyan	183,300,000	37
30	Jalan Puluhan Lor – Sawahan (Gorong-Gorong)	44,100,000	2
31	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 1	774,207,000	
	Jalan Ngaglik - Bayuran		106.00
	Jalan Samalo-Jetis		97.00
	Jalan Keyongan Kidul - Jomblang		197.00
	Jalan Cangkring-Medelan		224.00
	Jalan Bakulan-Nogosari		194.00
32	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 2	413,233,000	
	Jalan Dukuh-Geger		137.00
	Jalan Ngasem-Karang		123.50
	Jalan Karanganom-Ponggok Dua (Talud)		248
33	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 3	758,349,000	
	Jalan Koripan-Nglarang		189.00
	Jalan Cangkring - Ngajaran		252.00
	Jalan Sulang Kidul-Bondalem		175.00
	Jalan Kutu-Kedon,		171.00
	Jalan Bregan-Kutu		137.00
34	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 4	365,927,000	
	Jalan Klodran – Ngentak (Gorong-Gorong)		14
	Jalan Dongkelan - Jomegatan		112.00

NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PANJANG PENANGANAN (METER)
	Jalan Kalimantan - Batas Kabupaten Sleman		170.00
35	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 5	471,034,000	
	Jalan Gupakwarak - Dadabong		125.00
	Jalan Kasongan - Kalangan		210.00
	Jalan Kalangan - Kalangan		183.50
36	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 6	603,532,000	
	Jalan Gunung Cilik - Muntuk		270.00
	Jalan Sukorame - Karangasem		215.00
	Jalan Nglampengan - Loputih		97.00
	Jalan Koripan 1 - Dlingo 2		175.00
37	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 7	298,001,000	
	Jalan Ngjijo - Jolosutro		140.00
	Jalan Pelem Wulung - Jaranan		146.00
38	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 8	434,801,000	
	Jalan Mojosari - Depok		180.00
	Jalan Kedungrejo-Cegokan Dua		40.00
	Jalan Bawukan Satu - Bawukan Dua		255.00
39	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 9	485,965,000	
	Jalan Baran-Muneng		208.00
	Jalan Pranti - Cubung		178.00
	Jalan Kalijurang - Bonggalan		261.00
40	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 10	303,399,000	
	Jalan Ketalo - Gunturgeni,		169.00
	Jalan Gunturgeni - Klagaran		170.00
41	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 11	287,198,000	
	Jalan Panggang-Kemusuk		117.15
	Jalan Botokan - Jetis		171.00
42	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 12	260,594,000	
	Jalan tarudan - Druwo,		197.10
	Jalan Ngangkruk - Tanjung,		108.69



NO	PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PANJANG PENANGANAN (METER)
43	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 13	454,703,000	
	Jalan Mojohuro - Pelemadu		200.00
	Jalan Lanteng - Kajor Kulon		135.00
	Jalan Karang Kulon - Kedung Buweng,		184.00
44	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Paket 14	568,806,000	
	Jalan Cepor - Peni		215.10
	Jalan Dagan - Jomlang		172.57
	Jalan Paten - Kojo		239.60
TOTAL PANJANG JALAN TERTANGANI			15,519.51



Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Jalan Desa



PERSEMBAHAN  
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL

BANK BRI

RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL

**Selamat & Sukses**  
Khas Persembahan  
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL  
DARI KOMPITI B. BANTUL

**Selamat & Sukses**  
Khas Persembahan  
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL  
DARI DR. HON. JUDAH SAN...  
ANGGOTA DPRD BANTUL

**Selamat & Sukses**  
Khas Persembahan  
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI BANTUL  
DARI MY ESTI WLJ...  
WAKIL BUPATI BANTUL

### Rasio bangunan gedung yang laik fungsi

Laik fungsi adalah suatu kondisi dimana bangunan atau gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang telah ditetapkan. Penetapan suatu Gedung laik fungsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Sertifikat laik fungsi atau SLF. SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu gedung yang telah selesai masa pembangunannya. Pemerintah akan menerbitkan SLF apabila bangunan tersebut rampung dibangun mengikuti persyaratan kelaikan teknis yang sesuai dengan fungsi serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 0,40%, realisasi sebesar 1,7%, tercapai 425% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2022 (akhir Renstra) sebesar 0,6%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 283,33% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dari 14.381 unit gedung di Kabupaten Bantul terdapat 247 unit gedung yang telah memiliki SLF. Pencapaian sasaran pada indikator ini didukung oleh program sebagai berikut :

#### 1) Program Penataan Bangunan Gedung

Maksud dari program ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penataan bangunan gedung. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas bangunan Gedung. Anggaran program Penataan bangunan Gedung adalah sebesar Rp14.619.685.668,- dengan realisasi Rp13.781.107.398,- atau 94,26%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan bangunan Gedung serta peningkatan koordinasi pada penerbitan IMB dan SLF bangunan Gedung. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp14.619.685.668,- dengan realisasi Rp13.781.107.398,- atau 94,26%. Target dan realisasi keluaran berupa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebesar 100% atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam penyelenggaraan penerbitan IMB, SLF, peran TABG, pendataan bangunan Gedung dan implementasi IMB.

Dalam mendirikan bangunan Gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung.

Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp359.363.048,- terealisasi sebanyak Rp322.840.748,- atau tercapai 89,84%. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah pembayaran Tim Ahli

Bangunan Gedung (TABG) sebanyak 4 orang selama 12 bulan, data teknis bangunan Gedung sebanyak 12 dokumen dan penerbitan IMG/PBG. Realisasi fisik berupa pembayaran 4 orang TABG dan data teknis bangunan Gedung sebanyak 12 dokumen. Data penerbitan IMB/PBG Tahun 2020-2021 tersaji pada table berikut :

Tabel 21 Data penerbitan IMB/PBG dan SLF Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun	
	2021	2022
PBG	2	362
SLF	128	119

- Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja dalam proses perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan Gedung di Kabupaten Bantul.

Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp14.260.322.620,- terealisasi sebesar Rp13.458.266.650,- atau tercapai 94,38%. Target keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Gedung pemerintah yang dibangun/rehab sebanyak 11 unit, perencanaan teknis bangunan gedung sebanyak 9 dokumen, dan data teknis bangunan gedung sebanyak 11 dokumen. Realisasi fisik sebesar 100% semua pada semua target indikator. Gedung pemerintah yang dibangun pada Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 22 Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Nama Bangunan Gedung	Kapanewon	Keterangan
1	Pembangunan Gedung di Lingkungan POLRES	Bantul	Diserahkan kepada Polres Bantul
2	Landscape Komplek Parasamya	Bantul	
3	Pembangunan Gedung Pelayanan DPMPT		
4	Pembangunan Rumah Dinas Jabatan	Bantul	
5	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati	Bantul	
6	Rehabilitasi Eks SD Sabdodadi I	Bantul	
7	Landscape Dinas PUPKP	Bantul	
8	Landscape Kantor Kapanewon Sewon	Sewon	
9	Pembangunan pagar Kapanewon Piyungan	Piyungan	
10	Rehabilitasi Kantor Kapanewon Sanden	Sanden	
11	Pembangunan Talud pada SD Banjarharjo Dlingo	Dlingo	



Gambar 7. Pembangunan Gedung Pelayanan DPMPT di Komplek 2 Perkantoran Pemkab Bantul

## 2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator program ini adalah Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan target 72,84% terealisasi 92,95 atau 127,61%. Anggaran program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah sebesar Rp806.319.164,- dengan realisasi Rp682.818.648,- atau 84,68%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga terampil konstruksi melalui pelatihan teknis konstruksi. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp291.234.916,- dengan realisasi Rp223.272.915,- atau 76,66%. Target dan realisasi fisik kegiatan ini adalah Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 90 orang dan tercapai 90 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga terampil konstruksi. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp291.234.916,- dan terealisasi sebanyak Rp223.272.915,- atau terealisasi sebesar 76,66%.

Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan karena kegiatan sertifikasi tenaga terampil tidak dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat melakukan sertifikasi sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 /KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja

Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil pelatihan tenaga terampil konstruksi sebanyak 3 dokumen, atau tercapai 100%. Pelatihan tenaga terampil konstruksi dilaksanakan melalui 3 angkatan dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih sebanyak 90 orang. Data pelatihan tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 23 Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi Tahun 2022

Angkatan	Tanggal	Lokasi	Jumlah peserta
I	12 - 14 Juli 2022	Kalurahan Tamantirto	30
II	9 - 11 Agustus 2022	Kalurahan Panggungharjo	30
III	15 - 17 November 2022	Kalurahan Panjangrejo	30



Gambar 8. Pelatihan tenaga terampil konstruksi Tahun 2022

b) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp297.704.248,- dengan realisasi Rp244.307.432,- atau 82,06%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi yang dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). Standar Harga Barang/Jasa Bidang Konstruksi serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp297.704.248,- dengan realisasi Rp244.307.432,- atau 82,06%. Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah terlaksananya operasional SIPJAKI dalam 12 bulan. Laporan hasil kajian sebanyak 3 dokumen, atau tercapai 100%.

Dokumen kajian yang disusun pada sub kegiatan ini adalah :

- ✓ Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur sebanyak 1 dokumen
- ✓ Penyusunan Standar Harga dan Barang/Jasa Bidang Konstruksi sebanyak 2 dokumen

c) Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp217.380.000,- dengan realisasi Rp215.238.300,- atau 99,01%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas badan usaha konstruksi dalam pelaksanaan usaha sehingga meningkatkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp90.780.000,- dengan realisasi Rp90.280.000,- atau 99,45%. Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil workshop sebanyak 3 dokumen, atau tercapai 100%. Bimbingan teknis dilaksanakan 3 kali dengan rincian pada Tabel berikut ini :

Tabel 24. Bimbingan Teknis Tahun 2022

No.	Tanggal	Materi	Jumlah peserta
1	16 Juni 2022	Bimtek Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan – Pengantar PERMEN PUPR No.1 Tahun 2022	50
2	22 September 2022	Bimtek Perhitungan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Jalan berdasarkan PERMEN PUPR No.1 Tahun 2022	55
3	10 November	Bimtek Perhitungan Harga Satuan Sumber Daya Air dan Bangunan	65

2022	Gedung berdasarkan PERMEN PUPR No.1 Tahun 2022
------	--

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 9 . Bimbingan Teknis Tahun 2022

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp126.600.000,- dengan realisasi Rp124.958.300,- atau 98,70%. Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil kajian sebanyak 1 dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebanyak 8 dokumen, atau tercapai 100%.

Tabel 25. Sosialisasi Bina Konstruksi Tahun 2022

NO	TANGGAL	SOSIALISASI	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	01 November 2022	I	Kersen kapanewon Bantul	30
2	01 November 2022	II	Cengkehan Wukirsari Imogiri	30

3	02 November 2022	III	Argorejo Sedayu Bantul	30
4	08 November 2022	IV	Gadingharjo Sanden Bantul	30
5	09 November 2022	V	Karangtalun Imogiri Bantul	30
6	21 November 2022	VI	Sriharjo Imogiri Bantul	30
7	24 November 2022	VII	Ngestiharjo Kasihan Bantul	30
8	25 November 2022	VIII	Pendowoharjo Sewon Bantul	30

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 10. Sosialisasi Bina Konstruksi Tahun 2022



DI Karangploso  
-7,85206, 110,42602, 226°

### Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman.

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara dibandingkan dengan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Data capaian indikator sesuai tabel berikut ini :

Tabel 26. Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang	80,01	80,37	80,46	100,11	81,81	98,35



Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Indikator program ini adalah Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten dengan target 30% terealisasi sebesar 48,38% serta persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik dengan target 82,40% terealisasi sebesar 81,87%. Anggaran program ini adalah Rp.17.639.466.273,- terealisasi sebesar Rp.12.535.478.684,- atau mencapai 71,06%. Data panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 28 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20
2018	189.247,65	80,50	190.422,09	81,00
2019	192.773,00	82,00	193.125,60	82,15
2020	193.644,82	81,50	194.761,54	81,97
2021	192.773,00	82,00	194.865,27	82,89
2022	198.556,16	82,40	197.279,07	81,87

Sumber : DPUPKP, 2022

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk optimalisasi kinerja pengelolaan SDA. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.358.644.099,- terealisasi sebesar Rp6.875.493.800,- atau tercapai 93,33%. Target



indikator kegiatan ini adalah capaian kinerja pengelolaan sumber daya air sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 7.012.429.657,- terealisasi sebesar Rp. 4.746.280.700,- atau tercapai 67,68 %. Target indikator kegiatan ini adalah capaian kinerja pengelolaan sumber daya air sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai 100%.

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya laporan perencanaan teknis bangunan perkuatan tebing sebanyak 2 dokumen, tersusunnya laporan perencanaan teknis favour sebanyak 2 dokumen, dan laporan perencanaan teknis embung dan penampung air sebanyak 1 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 480.875.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 473.676.000,- atau terealisasi 98,50 %.

Data perencanaan teknis seperti tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 29 Data Perencanaan Teknis untuk Konstruksi Bangunan Air

No	Nama Paket Perencanaan	Perencanaan untuk Konstruksi
1	Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air Paket 1	Embung ngunut - Sriharjo, Imogiri
		Embung Sabrang Lor - Triwodadi, Pajangan
		Embung Kersan - Triwidadi, Pajangan

No	Nama Paket Perencanaan	Perencanaan untuk Konstruksi
		Embung seropan II - Munthuk, Dlingo
		Embung Tuk Duren II - Munthuk, Dlingo
		Embung Klepu - Temuwuh, Dlingo
		Embung Senet - Munthuk, Dlingo
		Embung Ndeso - Mangunan, Dlingo
		Embung Srunggo - Selopamioro, Imogiri
		Embung Pancuran - Terong, Dlingo
		Embung Saradan - Teromg, Dlingo
		Embung Tahunan - Selopamioro, Imogiri
2	Perencanaan Teknis Afvour Paket 1	Peningkatan Afvour Dronco
		Peningkatan Afvour Giriloyo Karangkulon
		Peningkatan Afvour Nogosari
		Peningkatan Afvour Tamanan
		Peningkatan Afvour Gaduh Patalan
		Afvour Plumutan
		Afvour Cangkring
		Afvour Dermojurang
		Afvour Dukuh
		Afvour Bobok Tempel
		Afvour Gunung Puyuh
		Afvour Mrisi
		Afvour Kemiri
		Afvour Tengah

Sumber : DPUPKP, 2022

- Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya  
Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah terbangunnya bangunan penampung air dengan tujuan supaya dapat menampung air hujan dan aliran permukaan (run off) pada wilayah sekitar sehingga dapat berfungsi sebagai sumber air pada saat musim kemarau. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 681.728.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 453.487.500,- atau terealisasi 66,52 %. Rendahnya realisasi

keuangan ini disebabkan oleh selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak yang jauh di bawah HPS.

Target indikator sub kegiatan ini adalah bangunan penampung air (embung) yang dibangun atau ditingkatkan sebanyak 3 unit dan tercapai sebanyak 3 unit. Data bangunan penampung air (embung) yang dibangun atau ditingkatkan pada Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 30 Data Bangunan Penampung Air (Embung) Tahun 2022

No	Nama Embung	Lokasi
1	Embung Depok Dlingo	Dlingo
2	Embung Lemahbang Mangunan	Dlingo
3	Embung Serayu	Bantul

Sumber : DPUPKP, 2022



Embung Serayu



Embung Lemahbang

Gambar 11. Proses Pelaksanaan Pembangunan Embung

- Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk membangun tanggul sungai dalam rangka pengamanan tanggul sungai/saluran pembuang irigasi agar tidak menyebabkan air meluap dan menimbulkan banjir. Anggaran sebanyak Rp. 3.425.960.000,- dengan realisasi Rp. 2.104.139.500,- atau terealisasi sebesar 61,42 %.

Target indikator sub kegiatan ini adalah saluran pembuang irigasi (afvour) yang dibangun atau ditingkatkan sebanyak 15 unit dan tercapai sebanyak 15 unit. Data afvour yang dibangun atau ditingkatkan pada Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 31 Data Peningkatan Afvour Tahun 2022

No	Nama Afvour	Lokasi (Kapanewon)
1	Peningkatan Afvour Buntung Mriyan	Kretek
2	Peningkatan Afvour Sedayu	Sedayu
3	Peningkatan Afvour Dronco	Imogiri
4	Peningkatan Afvour Giriloyo Karangkulon	Imogiri
5	Peningkatan Afvour Nogosari	Imogiri
6	Peningkatan Afvour Tlogo Sungapan	Imogiri
7	Peningkatan Afvour Karang Kaliputih	Sewon
8	Peningkatan Afvour Mredo Gatak	Sewon
9	Peningkatan Afvour Tamanan	Banguntapan
10	Peningkatan Afvour Tibayan Bakung	Sewon
11	Peningkatan Afvour Depok	Kretek
12	Peningkatan Afvour Gaduh Patalan	Pundong
13	Peningkatan Afvour Jedigan Pasutan	Bantul
14	Peningkatan Afvour Kembangan	Bambanglipuro
15	Peningkatan Afvour Sital	Kretek

Sumber : DPUPKP, 2022



Afvour Gaduh Patalan



Afvour Sital



Afvour Pasutan



Afvour Giriloyo

Gambar 12. Proses Pelaksanaan Pembangunan Afvour

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk melakukan rehabilitasi bangunan tebing dengan target output sebanyak 7 unit konstruksi perkuatan tebing sungai yang dibangun, teralisasi sebanyak 7 unit konstruksi perkuatan tebing. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.927.992s.437,- dengan realisasi Rp. 1.266.926.000,- atau terealisasi sebesar 65,71 %. Data rehabilitasi bangunan tebing yang dibangun atau ditingkatkan pada Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 32 Data Rehabilitasi Bangunan Tebing Tahun 2022

No	Nama Bangunan Tebing Sungai	Lokasi
1	Perkuatan Tebing Sungai Belik	Pleret
2	Perkuatan Tebing Sungai Celeng Klumprit Nogosari	Imogiri
3	Perkuatan Tebing Sungai Pelsing Guyangan	Pleret
4	Perkuatan Tebing Sungai Sili Banyusumurup	Imogiri
5	Perkuatan Tebing Sungai Bulus	Jetis
6	Perkuatan Tebing Sungai Widuri Sonosewu	Kasihani
7	Perkuatan Tebing Sungai Kedung Semerangan	Banguntapan

Sumber : DPUPKP, 2022



Tebing Sungai Belik



Tebing Sungai Widuri

Gambar 13. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk melakukan operasional dan pemeliharaan sumur air baku dengan target indikator berupa pemeliharaan sumur air baku sebanyak 1 unit dan laporan pemasangan jaringan listrik sumur bor sebanyak 1 dokumen. Kedua target indikator realisasinya 100%. Dengan output 1 unit pemeliharaan sumur air baku di Wukirsari, Imogiri dan 1 dokumen laporan pemasangan jaringan listrik sumur bor di Donotirto, Kretek dan Triharjo, Pandak. Anggaran sebesar Rp. 184.978.720,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 165.923.500,- atau terealisasi sebesar 89,70 %.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan target indikator berupa rambu larangan dan papan informasi pengelolaan SDA yang dipasang sebanyak 10 unit dan laporan hasil

sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan sumber daya air sebanyak 21 dokumen.

Realisasi fisik terpasang 10 papan informasi terkait pemanfaatan sumber daya air atau teralisasi 100% serta 21 dokumen laporan hasil sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan sumber daya air juga terealisasi 100%. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 310.895.500,- dengan realisasi Rp. 282.128.200,- atau terealisasi 90,75 %.

- b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dengan target indicator Daerah Irigasi yang ditingkatkan 82% terealisasi sebesar 82,08% atau tercapai sebesar 100,10%. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.627.036.616,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.789.197.984,- atau teralisasi sebesar 73,30%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 subkegiatan dengan keluaran masing-masing sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana teknis untuk konstruksi irigasi. Target keluaran 12 dokumen data teknis rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan 12 dokumen

data perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi. Realisasi fisik dapat tercapai sebanyak 12 dokumen data teknis rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi (terrealisasi 100%) dan 12 dokumen data perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi (terrealisasi 100%). Pagu anggaran sebesar Rp164.385.720,- dengan realisasi sebesar Rp144.138.720,- atau terrealisasi sebesar 87,68%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 subkegiatan dengan keluaran masing-masing sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana teknis untuk konstruksi irigasi. Target keluaran 12 dokumen data perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi, laporan hasil inventarisasi aset irigasi 2 dokumen, laporan hasil penyusunan e - paksi kegiatan DAK 1 dokumen, laporan hasil penyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi 3 dokumen, dan laporan hasil penyusunan Web GIS Irigasi 1 dokumen.

Webgis irigasi merupakan peta daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul berbasis website dengan alamat url di <https://webgisirigasi.bantulkab.go.id/>. Untuk data perencanaan teknis seperti tercantum pada table berikut :

Tabel 33 Data Perencanaan Teknis Konstruksi Irigasi

No	Nama Paket Perencanaan	Perencanaan untuk Konstruksi
1	Perencanaan Teknis Irigasi Paket 1	Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Gayam
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Widodo
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi



		Ngari
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sindet
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Cerme
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Kenalan
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tengah
2	Perencanaan Teknis Irigasi Paket 2	Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Wiyoro
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Kadisono
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Pacar
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Semarang
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Jotawang
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tegal
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Sorogenen
		Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Gempolan

Sumber : DPUPKP, 2022

Realisasi fisik semua dapat tercapai sesuai target yaitu 100%. Anggaran sebesar Rp. 768.941.096,- dengan realisasi sebesar Rp. 753.984.496,- atau terealisasi sebesar 98,05%.

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.703.985.078,- dengan realisasi

Rp. 5.917.335.396,- atau terealisasi sebesar 67,98 %. Target dan realisasi keluaran pada sub kegiatan ini tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 34 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	17 unit	17 unit	100%
2	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Irigasi	4 dokumen	12 dokumen	100%
3	Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	12 dokumen	12 dokumen	100%
4	Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air	12 dokumen	12 dokumen	100%
5	Laporan Perawatan kendaraan Alat Berat	12 dokumen	12 dokumen	100%
6	Laporan perawatan kendaraan Operasional	12 dokumen	12 dokumen	100%

Sumber : DPUPKP, 2022

Data Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 35 Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
1	Daerah Irigasi Kadisono	Pajangan
2	Daerah Irigasi Klegen	Pundong
3	Daerah Irigasi Mejing	Bambanglipuro
4	Daerah Irigasi Dung Gepeng	Dlingo
5	Daerah Irigasi Maladan	Dlingo
6	Daerah Irigasi Nawungan	Imogiri
7	Daerah Irigasi Seropan	Dlingo
8	Daerah Irigasi Tangkil	Dlingo
9	Daerah Irigasi Gayam	Sewon
10	Daerah Irigasi Gupit	Banguntapan
11	Daerah Irigasi Karangploso Kanan	Pleret

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
	Pleret	
12	Daerah Irigasi Tuk Ngembong	Banguntapan
13	Daerah Irigasi Wiyoro	Banguntapan
14	Daerah Irigasi Bayem	Kasih
15	Daerah Irigasi Karangjati	Sedayu
16	Daerah Irigasi Widodo	Pajangan
17	Daerah Irigasi Karangasem	Pundong

Sumber : DPUPKP, 2022



DI Tuk Ngembong



DI Gayam

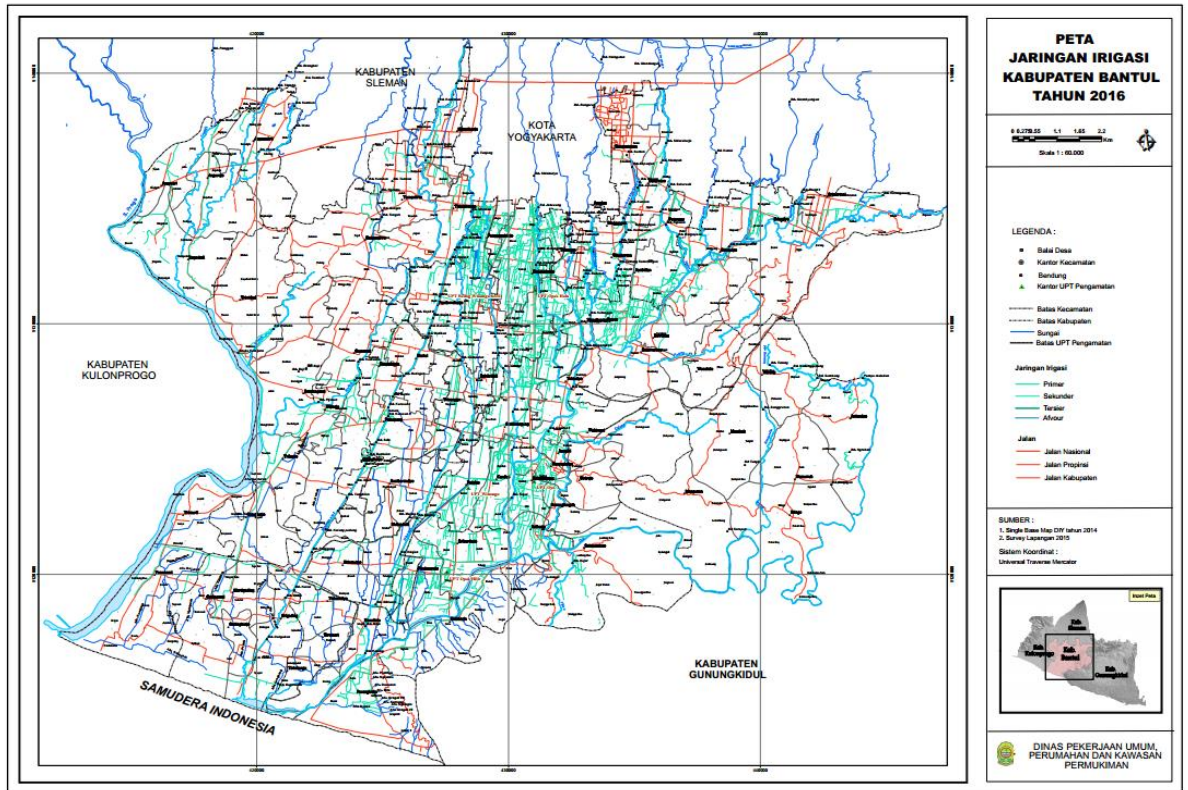


DI Karang Ploso



DI Wiyoro

**Gambar 14.** Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2022



Gambar 15. Peta jaringan irigasi di Kabupaten Bantul

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas jaringan irigasi permukaan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Pagu anggaran sebesar Rp.1.154.110.442,- dengan realisasi Rp.1.117.878.092,- atau terealisasi sebesar 96,86 %.
- Target dan realisasi indikator keluaran dari sub kegiatan ini tercantum pada table berikut :

Tabel 36 Target dan Realisasi Indikator Keluaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	BBM Solar Pompa Air	1.442 liter	1.442 liter	100%
2	Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	180 dokumen	180 dokumen	100%
3	Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	36 dokumen	36 dokumen	100%
4	Laporan hasil rapat koordinasi UPTD	15 dokumen	15 dokumen	100%
5	Laporan Pekerjaan Saluran	12 dokumen	12 dokumen	100%
6	Oli Pintu Air	20 kaleng	20 kaleng	100%
7	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	17 jenis	17 jenis	100%
8	Alat Operasional Lapangan	4 jenis	4 jenis	100%

Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi berupa gali sedimen, pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi:

Tabel 37 Lokasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon
1	DI Mutihan	Banguntapan
2	DI Tegal Kiri	Imogiri
3	DI Sorogenen	Jetis
4	DI Karang Ploso	Pleret
5	DI Salakan	Banguntapan
6	DI Kajor	Imogiri
7	DI Dokaran	Pleret
8	DI Pranti	Piyungan
9	DI Sindet	Imogiri

10	DI Sono	Kretek
12	DI Donoloyo	Banguntapan
13	Bendung Merdiko	Sewon
14	DI Timbulsari	Sewon
15	DI Mejing	Bambanglipuro
16	DI Kadibeso	Jetis
17	Afvour DI Tengah	Kasih
18	DI Bayem	Kasih
19	DI Kemiri	Bantul
20	Bendung Klegen	Bambanglipuro
21	DI Balong	Bantul
22	DI Siraman	Sewon
23	DI Kadisono	Pajangan
24	DI Gempolan	Bantul
25	DI Widodo	Pajangan
26	DI Karang	Kretek
27	DI Karangjati	Sedayu

Sumber : DPUPKP, 2022



Bendung Klegen



DI Sono



DI Balong



DI Karang

Gambar 16. Angkat sedimen dan pembersihan rumput dan tanaman liar pada saluran irigasi

- Pengelolaan bendung untuk penyediaan air irigasi bagi petani dilakukan pada 100 Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul
- Pengelolaan dan kesiapsiagaan bendung air pada musim hujan pada :
  - Bendung Klegen
  - Bendung Mejing
  - Bendung Ketonggo Bibis

### Penduduk Berakses Air Minum layak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum. Capaian indikator ini seperti tercantum pada table berikut ini :

Tabel 38. Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk berakses sanitasi layak	n/a	83,56	83,56	100	86,76	96,32

Sumber : DPUPKP, 2022

Capaian indikator kinerja penduduk berakses air minum layak adalah 83,56% dari target 83,56% atau tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 86,76% maka capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 96,32% dari target akhir Renstra tahun 2026.



Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator program ini adalah Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak dengan target 83,56% terealisasi 83,56% atau 100%. Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebesar Rp.9.613.738.032,- dengan realisasi Rp.8.725.318.382,- atau terealisasi 93,44 %.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait akses air minum. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.613.738.032,- dengan realisasi Rp. 8.725.318.382,- atau 93,44%. Target indikator dari kegiatan ini adalah 100% rumah tangga dengan akses air bersih dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM. Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini tercantum pada table berikut :

Tabel 39 Data Keluaran Dokumen Rencana Teknis dan Kebijakan SPAM

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Dokumen Perencanaan Teknis SPAM	4
2	Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SP	1
3	Laporan Hasil Studi identifikasi Sumur Dalam	1

Sumber : DPUPKP, 2022

Anggaran sub kegiatan ini Rp. 536.797.032,- dengan realisasi Rp417.421.882,- atau terealisasi 77,76%, dengan efisiensi selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak sebesar 22,24%.

- Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah laporan hasil pengawasan teknis sebanyak 2 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini Rp. 136.300.000,- dengan realisasi Rp.119.515.000,- atau terealisasi 87,69%.

- Peningkatan SPAM Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang mendukung meningkatnya jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perkotaan. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah laporan hasil koordinasi sebanyak 2 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 10.800.000,- dengan realisasi Rp. 10.800.000,- atau terealisasi 100%

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan perdesaan. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.2.587.450.000,- dengan realisasi Rp.2.562.431.500,- atau tercapai sebesar 99,03%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah 3 unit jaringan listrik 3 phase dan 470 unit peningkatan SPAM Perdesaan melalui Dana Alokasi Khusus. Realisasi yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah pembangunan 3 unit jaringan listrik 3 phase dan peningkatan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan sebanyak 502 Sambungan Rumah (SR). Data peningkatan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan Tahun 2022 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 40 Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPAM Bangunjiwo	Kasih	70
2	SPAM Seloharjo	Pundong	100
3	SPAM Selopamioro	Imogiri	100
4	SPAM Srigading	Kretek	51
5	SPAM Srimartani	Piyungan	181

Sumber : DPUPKP, 2022

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perkotaan. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp4.425.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.007.874.000,- atau teralisasi sebesar 90,56%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah perluasan Jaringan SPAM sebanyak 882 SR dan tercapai 100%. Data perluasan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan Tahun 2022 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 41 Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPAM Potorono	Banguntapan	200
2	SPAM Sriharjo	Imogiri	247
3	SPAM Timbulharjo	Sewon	160
4	SPAM Tirtosari	Kretek	275

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 17. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Sriharjo

- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM  
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp445.566.000,- dengan realisasi sebesar Rp417.276.000,- atau tercapai sebesar 93,65%. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah 2 dokumen Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum, dengan realisasi sebanyak 2 dokumen atau tercapai 100%. Selain itu, sub kegiatan ini juga melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan program penyediaan SPAM berupa fasilitasi honor pendamping atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
  
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perdesaan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp1.194.800.000,- dengan realisasi Rp1.190.000.000,- atau terealisasi 99,60%. Target Keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah peningkatan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan ini adalah 400 unit SR Hibah Air Minum Perdesaan dan 78 unit SR Hibah Khusus Pamsimas. Realisasi subkegiatan ini sebanyak 547 Sambungan Rumah (SR) pada 9 (Sembilan) lokasi. Data peningkatan SR SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan Tahun 2022 seperti pada Tabel berikut :

Tabel 42 Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	HAMP Baturetno	Banguntapan	58
2	HAMP Donotirto	Kretek	60
3	HAMP Murtigading	Sanden	53
4	HAMP Srimulyo	Piyungan	101
5	HAMP Sumberagung	Jetis	55
6	HAMP Triharjo	Pandak	54
7	HAMP Wirokerten	Banguntapan	51
8	SPAM Caturharjo	Pandak	47
9	SPAM Sendangsari	Pajangan	68

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 18. Perluasan SPAM di Kalurahan Wirokerten

### Penduduk Berakses Sanitasi Layak

Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian indikator ini seperti tercantum pada tab berikut ini :

Tabel 43. Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk berakses sanitasi layak	n/a	87,86	87,86	100	100	87,86

Sumber : DPUPKP, 2022

Capaian indikator kinerja penduduk berakses sanitasi layak adalah 87,86% dari target 87,86% atau tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 87,86% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator program ini adalah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dengan target 87,86% terealisasi 87,86% atau 100%. Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah sebesar Rp9.122.014.644,- dengan realisasi Rp8.753.676.692,- atau 95,96%

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan :

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait akses air limbah. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp9.122.014.644,- dengan realisasi Rp8.753.676.692,- atau 95,96%. Target keluaran dari kegiatan ini adalah 100% rumah tangga berakses sanitasi layak dan tercapai sebesar 100%

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) subkegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Anggaran sub kegiatan sebesar Rp558.972.032,- dan terealisasi sebesar



Rp535.009.882,- atau tercapai 95,71%. Target keluaran berupa 7 dokumen hasil perencanaan Teknis dan kajian Air Limbah dan tercapai sebanyak 7 dokumen atau tercapai 100%.

Data keluaran yang dihasilkan pada Sub Kegiatan ini tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 44 Data Keluaran Penyusunan Rencana Teknis dan Kebijakan SPALD

No	Nama Dokumen	Jumlah dokumen
1	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	5
2	Laporan hasil studi dan kajian Air Limbah.	2

Sumber : DPUPKP, 2022

- Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota  
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / perluasan SPALD -Terpusat. Anggaran sebesar Rp109.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp105.790.500,- atau tercapai 96,66%. Target keluaran yang dihasilkan berupa laporan hasil supervise sebanyak 3 dokumen dan tercapai 3 dokumen atau terealisasi 100%.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman  
Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan SPALD. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp2.199.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.965.977.000,-

atau tercapai 89,39%. Target keluaran adalah 265 unit SR SPALD dan terealisasi sebanyak 325 SR dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

Tabel 45 Data Perluasan SR SPALD Terpusat Sewon

No	Lokasi Perluasan SR	Jumlah SR	
		Target	Realisasi
1	Kalurahan Bangunharjo	135	181
2	Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon	79	69
3	Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan	66	75

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 19. SPALD-T Panggunharjo

- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sitem pengolahan setempat atau tangki septic pribadi. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp1.460.600.000,- terealisasi sebesar Rp1.460.600.000,- atau tercapai 100%. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 64 unit Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan 108 unit tangki septic terbangun. Realisasi keluaran adalah pembangunan tangki septic pribadi pada 6 (enam) lokasi sebanyak 177 unit. Data pembangunan tangki septic pribadi seperti pada Tabel berikut :

Tabel 46 Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah Unit
1	SPALDS Patalan	Jetis	51
2	SPALDS Terong	Dlingo	60
3	HALS Jatimulyo	Dlingo	18
4	HALS Potorono	Banguntapan	16
5	HALS Sendangsari	Pajangan	16
6	HALS Wijirejo	Pandak	16

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 20. Pembangunan Tangki Septik Individu di Jatimulyo, Dlingo

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  
Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp144.467.500,- terealisasi sebanyak Rp.142.345.000,- atau tercapai 98,53%. Target dan keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 15 dokumen dan 2 dokumen workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Data pelaksanaan sosialisasi dan workshop penguatan kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah seperti pada Tabel berikut :

Tabel 47 Data pelaksanaan sosialisasi Pengelolaan Air Limbah

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta (Orang)
1	Senin, 11 April 2022	Balai Desa Jatimulyo	26
2	Kamis, 14 April 2022	Aula Kalurahan Potorono	31
3	Selasa, 19 April 2022	Aula Kalurahan Sendangsari	28
4	Senin, 23 Mei 2022	Dusun Dagan, Murtigading	20
5	Jumat, 20 Mei 2022	Kalurahan Triharjo	20
6	Rabu, 25 Mei 2022	Dusun Bangkel, Srimulyo	29
7	Kamis, 17 Maret 2022	Kalurahan Srimartani	27
8	Jumat, 27 Mei 2022	Joglo Asoka Bumen wetan, Baturetno	29
9	Selasa, 24 Mei 2022	Mushola Al Mutadhin, Wirokerten	21
10	Selasa, 24 Mei 2022	Rumah Dukuh Bungas	34
11	Senin, 21 Maret 2022	Kalurahan Seloharjo	20
12	Kamis, 19 Mei 2022	Rumah Dukuh Kalipakel	31
13	Selasa, 12 April 2022	Aula Kalurahan Wijirejo	21
14	Senin, 21 Maret 2022	Kalurahan Seloharjo	23
15	Rabu, 24 Agustus 2022	Warung omah sawah	26

Sumber : DPUPKP, 2022

- Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan

### Air Limbah Domestik

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp557.982.000,- terealisasi sebanyak Rp557.982.000,- atau tercapai 100%. Target dan keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah sebanyak 3 dokumen serta Hibah Uang kepada Sekber Kartamantul dalam rangka Kerjasama operasional SPALD-Terpusat Sewon sebesar Rp300.000.000,-.

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah optimalisasi kinerja dalam operasional dan pemeliharaan SPALD-Terpusat Bambanglipuro. Anggaran sub kegiatan adalah Rp634.618.112,- dan terealisasi sebesar Rp608.391.310/181.362.960,- atau terealisasi sebesar 95,87%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Laporan hasil operasional SPALD-T Bambanglipuro sebanyak 3 dokumen atau tercapai 100%. SPALD-T Bambanglipuro merupakan SPALD – T yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2020-2021. Aset SPALD ini belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, akan tetapi sudah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Operasional telah dilaksanakan terhitung sejak Bulan Oktober 2021.

- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air

### Limbah Terpusat Skala Permukiman

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan system pengelolaan air limbah domestik (SPALD-T) skala permukiman. Anggaran sebesar Rp3.456.625.000,- terealisasi 97,71% atau Rp3.377.581.000,-. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Pembangunan SPALD-T dengan SR sebanyak 345 unit, dan terealisasi sebanyak 369 unit. Data pembangunan SPALD-T skala permukiman seperti pada Tabel berikut :

Tabel 48 Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPALD-T Permukiman Pleret	Pleret	57
2	SPALD-T Permukiman Segoroyoso	Pleret	51
3	SPALD-T Permukiman Seloharjo	Pundong	59
4	SPALD-T Permukiman Tirtosari	Kretek	57
5	SPALD-T Permukiman Wonokromo	Pleret	57
6	SPALD-T Permukiman Wukirsari	Imogiri	53
7	SPALD-T Permukiman Ngestiharjo	Kasihlan	35

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 21. Kunjungan Bupati dalam Rangka Peresmian SPALD-T Permukiman Seloharjo

2) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Indikator program ini adalah Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R dengan target 22,37% dan terealisasi sebesar 22,37% atau tercapai sebesar 100%. Anggaran Program ini adalah sebesar Rp. 771.899.850,- dengan realisasi Rp. 629.467.000,- atau terealisasi 81,55 %.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan :

a) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp771.899.850,- dengan realisasi Rp629.467.000 atau 81,55%. Target keluaran dari kegiatan ini adalah 22,67% prasarana



penanganan persampahan/TPS3R terpenuhi pada Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Persampahan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 75.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp71.539.500,- atau tercapai 94,57%. Target keluaran berupa 1 dokumen Lingkungan ITF Pasar Niten dan tercapai sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan supervisi terhadap Pelaksanaan pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 18.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp17.849.500,- atau tercapai 94,44%. Target keluaran berupa Laporan Pengawasan Teknis Persampahan dan tercapai sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan Depo Sampah dan Rumah Pilah Sampah Tipe A. Anggaran sub kegiatan sebesar Rp677.349.850,- terealisasi sebesar Rp540.078.000,- atau tercapai 79,73%. Target keluaran

yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Capaian Kinerja Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 100%. Realisasi keluaran adalah pembangunan 1 Depo Sampah di Tirtonirmolo dan 1 Rumah Pilah Sampah Tipe A di Modalan, Banguntapan atau tercapai 100%.



Gambar 22. Rumah Pilah Sampah Tipe A di Banguntapan

### 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator program ini adalah Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan dengan target 3,97%. Anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebesar Rp4.619.167.631,- dengan realisasi Rp3.760.912.800,- atau 81,42%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase untuk mencegah terjadinya genangan air hujan. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp4.619.167.631,- dengan realisasi Rp3.760.912.800,- atau 81,42%. Target dan realisasi keluaran adalah 100% Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan atau tercapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja dalam operasional dan pemeliharaan system drainase. Anggaran sebesar Rp319.112.131,- terealisasi sebanyak Rp290.139.300,- atau tercapai 90,92%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 16 unit saluran drainase terpelihara.

Data pemeliharaan drainase seperti pada Tabel berikut :

Tabel 49 Pemeliharaan Drainase Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon
1	Gunung Saren Lor, Trimurti, srandakan	Srandakan
2	Komplek perkantoran II, Manding	Bantul
3	Geblog, Bantul, Bantul	Bantul
4	Glugo. Panggungharjo, Sewon	Bantul
5	Barat SMA 1 Srandakan, Srandakan	Srandakan
6	Komplek Kapanewon Srandakan	Srandakan
7	Puron, Trimurti, Srandakan	Srandakan
8	Depan Kapanewon Sanden, Murtigading, Sanden	Sanden
9	Piring, Murtigading, Sanden	Sanden
10	Pasar Celep, Srigading, Sanden	Sanden
11	Depan Kalurahan Wonokromo, Pleret	Pleret
12	Perempatan Jetis( Jl. Wojo –	Jetis

No	Uraian	Kapanewon
	Barongan )	
13	Bantul Kota: Nyangkring, Bantul Warung, Bejen	Bantul
14	Parangtritis, Kretek	Kretek
15	Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan	Kasihan
16	Drainase Rusunawa Projo Tamansari II	Kasihan

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 23. Pemeliharaan Drainase Sempu di Kapanewon Kasihan

- Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah, melakukan supervisi terhadap Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Drainase Lingkungan. Anggaran sebesar Rp.171.300.000,- terealisasi sebesar Rp.166.357.000,- atau tercapai 97,11%. Target keluaran yang

dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Dokumen teknis pengawasan drainase sebanyak 2 dokumen

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase. Anggaran sebesar Rp194.150.000,- terealisasi sebesar Rp153.179.500,- atau tercapai 78,90%, dengan efisiensi selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak sebesar 21,1%. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah Dokumen teknis perencanaan drainase sebanyak 2 dokumen

- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan untuk kelancaran aliran air hujan sehingga tidak menyebabkan genangan. Anggaran sebesar Rp3.934.605.500,- terealisasi sebesar Rp3.151.237.000,- atau tercapai 80,09%. Target dan realisasi keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah 20 unit saluran drainase berhasil dibangun atau tercapai 100%. Data pembangunan sistem drainase lingkungan tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 50 Data pembangunan sistem drainase lingkungan Tahun 2022

No	Uraian	Kapanewon	Panjang (m)
1	Drainase Dlingo	Dlingo	154,5
2	Drainase Gunungan Pleret Pleret	Pleret	149
3	Drainase Kebonagung	Imogiri	194,4
4	Drainase Srimartani	Piyungan	183,6
5	Drainase Wukirsari	Imogiri	134,4
6	Drainase Caturharjo Pandak	Pandak	154,8
7	Drainase Dongkelan Panggungharjo sewon	Sewon	192
8	Drainase Ngaglik Pendowoharjo	Sewon	183,6
9	Drainase Ngrukem Pendowoharjo	Sewon	145,2
10	Drainase Timbulharjo	Sewon	184,8
11	Drainase Gulon Srihardono	Pundong	204
12	Drainase Murtigading	Sanden	187
13	Drainase Seloharjo	Pundong	182
14	Drainase Tirtosari	Kretek	206
15	Drainase Trimurti	Srandakan	157
16	Drainase Padokan	Kasihani	188,4
17	Drainase Potorono Banguntapan	Banguntapan	183,6
18	Drainase singosaren	Banguntapan	155,4
19	Drainase Tamantirto	Kasihani	195,6
20	Drainase Tirtonirmolo	Kasihani	206,4

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 24. Pembangunan Drainase Lingkungan di Ngaglik Pendowoharjo Sewon



7.88

Da



## 2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini. Indikator seperti pada tabel di bawah.

Tabel 51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2022		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
		2021	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penanganan kawasan kumuh	92,49	10,59	44,72	422,29	52,95	84,46

Sumber : DPUPKP, 2022

### Penanganan kawasan kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahal harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja Penanganan Kawasan kumuh adalah 44,72% dari target 10,59% atau tercapai 422,29% atau bernilai kinerja sangat tinggi.

Capaian realisasi tahun 2022 jauh lebih tinggi dari capaian realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,49%.. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 52,95% maka capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 84,46% dari target akhir Renstra tahun 2022.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1) Program Pengembangan Perumahan

Indikator program ini adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Target realiasi tahun 2022 sebesar 100 %, dan tercapai 100%, karena tidak terdapat bencana di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022.

Anggaran program Pengembangan Permukiman sebesar Rp. 3.902.370.374,- dengan realisasi Rp. 3.169.696.086,00,- atau 81,22 %.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan :

a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pendataan rumah korban bencana serta penyediaan dan rehabilitasi bagi rumah korban bencana. Selain itu relokasi bagi rumah rawan bencana juga dilakukan pada kegiatan ini. dari kegiatan ini adalah 1 (satu) jenis data dengan realisasi 1 (satu) jenis data.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.328.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.723.000,00 atau sebesar 58,09 %. Indikator sub kegiatan ini berupa laporan hasil identifikasi.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang sering terjadi bencana alam. Berbagai bencana alam yang sering terjadi antara lain seperti banjir, gempa bumi, serta potensi tsunami, gerakan tanah, dan angin kencang. Setiap jenis bencana tersebut mempunyai tingkat bahaya yang bervariasi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda tergantung pada karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi daerah yang terlanda. Kecenderungan terhadap terjadinya bencana untuk saat ini maupun masa yang akan datang masih cukup besar. Bencana longsor dan banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bantul, dan mempunyai frekuensi kejadian longsor yang sangat tinggi dan hampir setiap tahun mengalami peningkatan yang dipicu dengan kondisi topografi mulai dari curam sampai sangat curam yang dikombinasikan dengan curah hujan yang tinggi, dimana curah hujan yang tinggi telah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor menimpa beberapa wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Bantul diantaranya adalah Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Secara lengkap, hasil identifikasi seperti tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 52 Hasil Identifikasi Rumah Rawan Longsor di Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH RUMAH	JML KK	JML JIWA	KESEDIAAN RELOKASI	LAHAN RELOKASI	KONDISI FISIK RUMAH		STATUS PEMILIKAN RUMAH	
								RLH (Rumah Layak Huni)	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Hak Milik	Sewa
1	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	15	17	48	0	1	12	3	14	1
2	PAJANGAN	TRIWIDADI	176	222	703	102	76	158	18	173	3
		SENDANGSARI	32	38	109	8	7	31	1	32	0
3	DLINGO	MANGUNAN	36	36	108	36	0	36	0	36	0
		MUNTUK	103	103	321	103	0	98	5	103	0
		JATIMULYO	8	9	28	8	0	7	1	8	0
4	IMOIRI	SRIHARJO	96	123	337	11	0	59	37	96	0
		SELOPAMIORO	490	674	1858	4	6	378	112	490	0
		GIRIREJO	17	17	57	17	0	12	5	15	2
		KARANGTENGAH	50	50	142	0	0	45	5	25	25
		WUKIRSARI	203	244	709	166	10	143	60	200	3
		JUMLAH TOTAL	1,226	1,533	4,420		100	979	247	1,192	34
						45S					

Sumber : DPUPKP, 2022

Tabel 53 Hasil Identifikasi Rumah Rawan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH RUMAH	JML KK	JML JIWA
1	PANDAK	WIJIREJO	54	69	194
2	KASIHAN	BANGUNJIWO	61	74	195
3		TIRTONIRMOLO	63	96	303
4	PAJANGAN	SENDANGSARI	55	66	205
5		GUWOSARI	26	30	89
6	SANDEN	GADINGHARJO	95	107	318
7		GADINGSARI	10	15	38
8		SRIGADING	120	144	399
9	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	83	105	313
10	JETIS	SUMBERAGUNG	110	110	341
11		TRIMULYO	217	217	648
12	BANTUL	TRIRENGGO	369	369	1292

13		RINGINHARJO	40	40	165
14	SRANDAKAN	TRIMURTI	64	96	256
15		PONCOSARI	39	61	165
16	KRETEK	TIRTOHARGO	205	272	699
17		TIRTOSARI	329	445	1209
18		DONOTIRTO	221	278	749
19	IMOGIRI	SRIHARJO	70	100	280
20		GIRIREJO	102	123	355
21		KARANGTENGAH	456	467	1409
22		SELOPAMIORO	312	354	1023
Total			3,101	3,638	10,645

Sumber : DPUPKP, 2022

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini tidak dapat terserap 100% dikarenakan proses persiapan lahan untuk relokasi belum dapat direalisasikan.

- b) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah kegiatan pelaporan pengelolaan rumah susun dan melakukan optimalisasi kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun. Target dari kegiatan ini berupa 1 dokumen laporan. Anggaran sebesar Rp. 3.221.098.342,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.678.194.254,00 atau 83,15%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.221.098.342,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.678.194.254,00 atau 83,15%.

Indikator sub kegiatan ini berupa laporan pemeliharaan rusunawa.

Kegiatan yang dilakukan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas Kalurahan Banguntapan, Ngestiharjo, Panggungharjo dan Tamanan.

Laporan hasil pengelolaan rusunawa merupakan pelaporan 4 unit rusunawa di Kabupaten Bantul.

Adapun uraian subkegiatan yang dilaksanakan berupa operasional UPTD RSP, pemeliharaan UPTD RSP dan semua fasilitas di dalamnya, pemeliharaan jaringan air limbah yang sudah tersambung ke IPAL Terpusat, dan sewa tanah kas Kalurahan Banguntapan, Ngestiharjo, Panggungharjo dan Tamanan.

Pada kegiatan ini dihasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sewa hunian Rusunawa dan retribusi pengolahan limbah cair dengan rincian seperti Tabel berikut :

Tabel 54 Pendapatan Asli Daerah dari Rusunawa dan Pengolahan Limbah Cair Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	
		Retribusi Rusunawa	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	2017	1.329.898.200	108.009.500
2	2018	1.775.835.400	128.619.000
3	2019	1.824.933.500	134.362.500
4	2020	1.367.354.786	82.608.000
5	2021	1.588.443.500	138.288.300
6	2022	1.565.895.500	152.137.000

Sumber : DPUPKP, 2022

- c) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 352.972.032,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.778.832,00 atau 85,21 %.

Site plan perumahan menjadi salah satu bagian yang sangat penting dan harus diketahui baik untuk pengembang maupun konsumen. Site plan perumahan atau rencana tapak merupakan gambar pemetaan yang akan menentukan potensi serta daya saing suatu kompleks perumahan jangka panjang. Oleh sebab itu, perencanaan site plan rumah harus dilakukan secara matang

dengan perhitungan yang kuat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun, perencanaan site plan rumah selain memperhatikan aspek bangunan dan potensinya, site plan juga harus memperhatikan pendekatan lingkungan maupun area hijau.

Dengan menggunakan site plan, tampak area secara fisik dapat terlihat bersama setiap bangunan, serta sarana dan prasarana yang berada di lingkungan sekitarnya. Mulai dari akses jalan yang dapat digunakan, sampai fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, perniagaan, rumah ibadah, lapangan terbuka, dan lainnya. Rencana tapak juga menjadi syarat dokumen wajib untuk bisa mendapatkan izin Persetujuan Bangunan Gedung.

Secara lengkap, data penerbitan site plan Tahun 2022 seperti tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 55 Penerbitan Izin Site Plan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	NAMA PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN
1	PT. Cakrawala Metrik Perum. Taman Ayom Sedayu	Dusun Kemusuk Kidul, Argomulyo, Sedayu, Bantul
2	PT. Biva Karya Jaya Perumahan Griya Asri Sendangsari	Sendangsari, Pajangan, Bantul, Diy
3	PT. Mugi Mukti Mulia Perum. Mukti Pandes	Pandes I, Wonokromo, Pleret. Bantul
4	PT. Insan Barokah Ridho Illahi Perum Pandak Carani Madani	Dusun Depok, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
5	PT. Karya Indah Pratama Perum. Pesanggrahan Kasuari	Dusun Ponegaran, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul



NO	NAMA PENGEMBANG	LOKASI PERUMAHAN
6	PT. Dewi Sri Sejati Perum. Wonolelo Jogja Hills	Mojosari, Wonolelo, Pleret, Bantul, Diy
7	PT. Sumber Baru Land Perum. Pondok Permai Parangtritis 2	Ngireng-Ireng, Panggungharjo, Sewon, Bantul
8	PT. Bumi Arofatuna Selaras Perum. Cluster Triwidadi	Gampeng, Triwidadi, Pajangan, Bantul
9	PT. Bumi Purnama Raya Perum. Kirana Garden Residence Tahap 2	Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan, Bantul
10	PT. Laksa Griya Panorama Perum. Puri Anindya	Pereng Wetan, Arogorejo, Sedayu, Bantul
11	PT. Sudibyo Timbul Sukses Perum. Griya Asha Pulosari	Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul
12	PT. Bangun Indonesiaku Jaya Perum. The Naya Residence	Metes, Argorejo, Sedayu, Bantul
13	PT. Rizki Rahmad Manunggal Perum. Grand Village Banguntapan	Balong Kidul, Banjar Dadap, Potorono, Banguntapan, Bantul
14	PT. Sumber Baru Residence Perum. Laguna Spring Hill	Condrowangsan, Potorono, Banguntapan, Bantul

Sumber: DPUPKP, 2022

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan instansi yang salah satunya bertugas untuk menerbitkan izin siteplan diatas. Pada sub kegiatan ini, terdapat beberapa kegiatan antara lain:

1. Rapat Koordinasi
2. Sosialisasi PSU
3. Jasa Konsultansi



Gambar 25. Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan di Kabupaten Bantul

## 2) Program Kawasan Permukiman

Indikator program ini adalah Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani. Target realiasi tahun 2022 sebesar 10,59 %, dan tercapai 7,6 %.

Anggaran program Pengembangan Permukiman sebesar Rp. 9.196.818.458,- dengan realisasi Rp. 8.990.795.750,00,- atau 97,76 %.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

### a) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Target dari indicator kinerja tahun 2022 pada kegiatan ini adalah 2 kawasan dan terealisasi sebanyak 2 kawasan atau 100%.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 929.610.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 906.269.250,- atau 97,49%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Anggaran sebesar Rp. 929.610.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 906.269.250,- atau 97,49 %.

Permukiman kumuh bisa tumbuh dari suatu permukiman yang mengalami urbanisasi, umumnya permukiman yang kepadatannya relatif tinggi, tidak memiliki struktur jaringan pelayanan yang teratur, prasarana permukiman yang minim, bahkan di Indonesia permukiman kumuh ini tumbuh terutama karena lemahnya pengendalian dan masyarakatnya cenderung miskin. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pelaksanaan Sosialisasi RTLH
2. Penyusunan DED Kawasan Kumuh

Tabel 56 Peserta Sosialisasi Rumah Tidak layak Huni di Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	JUMLAH BNBA per KAL	Jumlah BNBA Per kapanewon
1	PAJANGAN	GUWOSARI	25	75
		SENDANGSARI	25	
		TRIWIDADI	25	
2	PIYUNGAN	SRIMARTANI	15	37
		SRIMULYO	22	
3	PUNDONG	SELOHARHO	20	20
4	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	2	2
5	BANGUNTAPAN	BATURETNO	18	18
6	BANTUL	RINGINHARJO	15	26
		TRIRENGGO	11	
7	DLINGO	MUNTUK	1	1
8	IMOGIRI	KARANGTENGAH	17	48
		SELOPAMIORO	18	
		WUKIRSARI	13	
9	JETIS	SUMBERAGUNG	1	2
		PATALAN	1	
10	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	6	6
11	KRETEK	TIRTOSARI	1	1
12	PUNDONG	PANJANGREJO	8	33
		SRIHARDONO	25	
13	SEDAYU	ARGODADI	13	13
TOTAL			282	282

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 26. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Di Kapanewon Imogiri Bantul

b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh. Target dari indicator kinerja tahun 2022 pada kegiatan ini adalah 2 kawasan dan terealisasi sebanyak 2 kawasan atau 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.267.208.458,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.084.526.500,00,- atau 97,79 %. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, diantaranya :

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Anggaran sebesar Rp. 2.950.443.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.938.451.000,- atau 99,59 %. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit RTLH yang diperbaiki yaitu 133 unit dan

tercapai 100%. Data Perbaikan RTLH tercantum pada table berikut :

Tabel 57 Data Perbaikan RTLH Tahun 2022

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Rumah (unit)
1	Baturetno	Banguntapan	18
2	Ringinharjo	Bantul	15
3	Trirenggo	Bantul	11
4	Karangtengah	Imogiri	15
5	Selopamioro	Imogiri	18
6	Wukirsari	Imogiri	13
7	Panjangrejo	Pundong	8
8	Srihardono	Pundong	24
9	Tirtonirmolo	Kasihani	6
10	Argodadi	Sedayu	4

Sumber : DPUPKP, 2022





Gambar 27. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kalurahan Argodadi

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 564.765.458,- dan terealisasi sebesar Rp. 402.325.500,00,- atau 71,24 %.

Permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi parameter permukiman kumuh diantaranya;

- Kondisi Bangunan Gedung
- Kondisi Jalan Lingkungan
- Kondisi Penyediaan Air Minum
- Kondisi Drainase Lingkungan
- Kondisi Pengelolaan Air Limbah
- Kondisi (pengamanan) Proteksi Kebakaran

Kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini berupa penanganan Kawasan kumuh di Dusun Deresen Kalurahan Trirenggo dan Dusun Kweden Kalurahan Trirenggo.







Gambar 28. Penataan Kawasan Kumuh di Dusun Kweden Kalurahan Tirirenggo

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni  
Anggaran sebesar Rp. 4.752.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.743.750.000,00,- atau 99,83 %. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit RTLH terbangun dengan target 132 unit dan terealisasi 100%.

Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Bansos RTLH menjadi prioritas karena rumah layak adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Rumah sebagai tempat tinggal, tidak hanya sebatas sebagai tempat berteduh semata tetapi juga sebagai media interaksi sosial keluarga.

Data pelaksanaan pembangunan baru RTLH seperti pada table berikut :

Tabel 58 Data Pembangunan Baru RTLH Tahun 2022

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah RTLH yang Dibangun (Unit)
1	Srimartani	Piyungan	15
2	Srimulyo	Piyungan	22
3	Seloharjo	Pundong	20
4	Triwidadi	Pajangan	25
5	Sendangsari	Pajangan	25
6	Guwosari	Pajangan	25

Sumber : DPUPKP, 2022





Gambar 29. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni di Kalurahan Srimulyo

- 3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh  
Indikator program ini adalah Persentase rumah layak huni. Target tahun 2022 sebesar 98,18 %, dan tercapai 99,25 %.  
Anggaran program ini sebesar Rp. 340.000.000,- dengan realisasi Rp. 340.000.000,- atau 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan :
  - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan Kawasan kumuh. Target dari indikator kinerja tahun 2022 pada kegiatan ini adalah 21 unit dan terealisasi sebanyak 21 unit atau 100%.

Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,- dengan realisasi Rp. 340.000.000,- atau 100 %. Pada kegiatan ini terdapat 1 (tsatu) sub kegiatan, yaitu:

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Anggaran sebesar Rp. 340.000.000,- dengan realisasi Rp. 340.000.000,- atau 100 %.

Pembangunan perumahan baik oleh pemerintah maupun swasta berdampak pada meningkatnya intensitas lahan terbangun, bahkan lahan konservasi juga dijadikan sebagai perluasan permukiman. Keberadaan permukiman sebagai tempat penduduk beraktivitas dan juga tinggal sering kali menemui berbagai permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas permukiman penduduk setempat. Salah satu isu yang masih sulit untuk dihindari dalam perkembangan wilayah di Indonesia adalah pertumbuhan permukiman kumuh.

Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah jumlah peningkatan kualitas RTLH sebanyak 14 unit dengan rincian seperti table berikut :

Tabel 59 Data Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah RTLH yang Ditingkatkan Kualitasnya (Unit)
1	Muntuk	Dlingo	1
2	Mulyodadi	Bambanglipuro	2
3	Sumberagung	Jetis	1
4	Patalan	Jetis	1
5	Tirtosari	Kretek	1
6	Argodadi	Sedayu	9
7	Karangtengah	Imogiri	2

Sumber : DPUPKP, 2022

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator program ini adalah Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Target tahun 2022 sebesar 100 %, dan tercapai 100 %.

Anggaran program Pengembangan Permukiman sebesar Rp. 189.825.000,- dengan realisasi Rp. 181.765.000,- atau 95,75 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan :

a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyediaan PSU bagi penyelenggaraan perumahan. Target dari indicator kinerja tahun 2022 pada kegiatan ini adalah 1 jenis dokumen dan terealisasi sebanyak 1 jenis dokumen atau 100%.

Anggaran sebesar Rp. Rp. 189.825.000,- dengan realisasi Rp. 181.765.000,- atau 95,75 %. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Anggaran sebesar Rp. Rp. 189.825.000,- dengan realisasi Rp. 181.765.000,- atau 95,75 %

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin tinggi, berpengaruh pada tuntutan akan terpenuhinya berbagai fasilitas umum dan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan bermasyarakat pada kawasan perumahan. Salah satu komponen yang menjadi prioritas untuk menunjang kenyamanan kegiatan bermasyarakat pada suatu kawasan perumahan yaitu tersedianya tempat pemakaman yang cukup. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban bagi para developer untuk menyediakan tanah pemakaman bagi para warga yang menghuni suatu kawasan perumahan. Berbagai cara dapat diupayakan para developer untuk menyediakan sarana tempat pemakaman pada suatu perumahan, baik dengan menyediakan lahan kosong yang diperuntukkan warga untuk tempat pemakaman ataupun dengan dana untuk penyediaan lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Total Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sampai dengan tahun 2022 sebanyak 192

perumahan, sedangkan PSU yang sedang dalam proses penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 25 perumahan dari 14 pengembang. Data perumahan yang sedang dalam proses penyerahan PSU seperti pada table berikut :

Tabel 60 Data Penyerahan PSU Perumahan

NO	PERUSAHAAN /PENGEMBANG	PERUMAHAN
1	PT. Cakrawala Metrik	1 Grand Ambarukmo
2	PT. Karya Sehati	2 Puri Tamansari 2
		3 Jalimbar Residence
		4 Puri Gardenia
		5 Jalimbar Residence
3	PT. Jogja Graha Selaras	6 Royal Mansion Banguntapan Thp I
4	PT jogja Graha Sejahtera Selaras	7 Symphoni Banguntapan
5	PT. Merapi Arsita	8 Alam Brajan Residence
		9 Griya Kuantan Amarta
		10 Kuantan Regency Kadipiro
		11 Sekar Bangkung Residence
6	PT. Mugi Mukti Mulia	12 Mukti Sewon Residence
		13 Mukti Banguntapan Residence
		14 Mukti Banguntapan Residence 2
7	PT. Fortuna Buana Realtindo	15 Fortuna Mansion Wonokromo
8	PT. Sumber Baru Land	16 PP Tamantirto 3
		17 Pondok Permai Wirobrajan
		18 Pondok Permai Parangtritis
		19 Pondok Permai Giwangan
9	PT Solusindo Jitu	20 Graha Inggil
10	PT. Prestasi Investa Pratama	21 Puri Permata Nirwana
12	PT. Graha Terasama	22 Terasama Estate

		23	Villa Argomulyo
13	KSO Kreasi Sehati	24	Villa Gardenia
14	Dwi Mitra Intitama	25	Grand Permata Residence

Sumber : DPUPKP, 2022



Gambar 30. Survey ketersediaan PSU di Lokasi Perumahan



Permasalahan :

Dari 2 (dua) sasaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap
2. Kondisi Bangunan Gedung belum 100% laik fungsi
3. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
4. Belum optimalnya akses air minum yang layak
5. Belum optimalnya akses sanitasi layak
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Masih adanya Kawasan kumuh yang belum tertangani
9. Masih terdapat backlog perumahan dan rumah tidak layak huni

Solusi

Dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan pada jalur jalan yang mengalami kerusakan
2. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung pemerintah
3. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air minum
5. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan air limbah

6. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase
7. Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi
8. Meningkatkan sinergitas penanganan Kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp. 176.940.765.145,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 149.474.339.540,- atau sebesar 84,48%.

Alokasi anggaran Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 61.** Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	163.311.751.313	92,40
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	13.439.188.832	7,60
Total belanja		176.940.765.145	100

Sumber : DPUPKP, 2022

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 92,40% dari total belanja. Sedangkan, anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman sebesar 7,60% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada tahun 2022 sebesar 84,48% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar 93,76%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 71,06%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman menyerap anggaran paling besar yaitu 93,01% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas sarana prasarana publik menyerap anggaran terkecil yaitu 83,74% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel 62** Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tingkat Kemantapan Jalan	78,43	78,93	100,64	106.395.685.051	87.911.864.512	82,63
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,40	1,7	425,00	15.426.004.832	14.463.924.046	93,76
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,37	80,46	100,11	17.639.466.273	12.535.478.684	71,06
4	Penduduk berakses air minum layak	83,56	83,56	100	9.337.513.032	8.725.318.382	93,44
5	Penduduk berakses sanitasi layak	87,86	87,86	100	14.513.082.125	13.124.358.492	83,74
6	Penanganan kawasan kumuh	10,59	44,72	422,29	13.439.188.832	12.500.471.836	93,02

Sumber : DPUPKP, 2022

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 15,55%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rasio luas daerah irigasi kewenangan

kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 28,94%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar 6,24%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 16,26% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, efisiensi anggarannya lebih kecil yaitu 6,98% dari anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel 63.** Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Tingkat Kemantapan Jalan	106.395.685.051	87.911.864.512	18.483.820.539	17,37
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	15.426.004.832	14.463.924.046	962.080.786	6,24
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	17.639.466.273	12.535.478.684	5.103.987.589	28,94
4	Penduduk berakses air minum layak	9.337.513.032	8.725.318.382	612.194.650	6,56
5	Penduduk berakses sanitasi layak	14.513.082.125	13.124.358.492	1.388.723.633	16,26
6	Penanganan kawasan kumuh	13.439.188.832	12.500.471.836	938.716.996	6,98
	Jumlah	176.940.765.145	149.474.339.540	27.466.425.605	15,55

Sumber : DPUPKP, 2022



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada

yang melebihi target atau rata-rata tercapai sebesar 208,01% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



